



Jurusan Akuntansi Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia



Jurnal Akuntansi Multiparadigma

www.jamal.ub.ac.id



REFLEKSI YUDHISTIRA DALAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN AKUNTANSI LINGKUNGAN

Irene Natalia

Universitas Surabaya, Jl. Ngagel Jaya Selatan No. 169, Surabaya 60284

Surel: irenenatalia@staff.ubaya.ac.id

Volume 13
Nomor 1
Halaman 42-59
Malang, April 2022
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:
21 Januari 2022
Tanggal Revisi:
26 April 2022
Tanggal Diterima:
30 April 2022

Kata kunci:

akuntansi lingkungan,
mahabharata,
tanggung jawab sosial,
yudhistira

Mengutip ini sebagai:

Natalia, I. (2022). Refleksi Yudhistira dalam Tanggung Jawab Sosial dan Akuntansi Lingkungan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1), 42-59. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.13.1.04>

Abstrak - Refleksi Yudhistira dalam Tanggung Jawab Sosial dan Akuntansi Lingkungan

Tujuan Utama - Artikel ini bertujuan merefleksikan nilai Yudhistira dalam pengelolaan tanggung jawab sosial dan akuntansi lingkungan.

Metode - Metode kajian interpretasi dengan studi literatur digunakan. Nilai Yudhistira digunakan untuk menilai pengelolaan tanggung jawab sosial dan akuntansi lingkungan.

Temuan Utama - Pengelolaan tanggung jawab sosial dan akuntansi lingkungan telah merefleksikan kelima nilai Yudhistira. Keseimbangan dalam komponen nilai Yudhistira membawa dampak luas bagi masyarakat. Penggunaan kearifan lokal dalam pengelolaannya penting untuk mengupayakan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Implikasi Teori dan Kebijakan - Evolusi tanggung jawab sosial dan akuntansi lingkungan perlu ditingkatkan. Perkembangan dinamis akuntansi lingkungan mengikuti perkembangan tanggung jawab sosial bermanfaat untuk meningkatkan keselarasan dan alokasi tanggung jawab pihak-pihak terkait.

Kebaruan Penelitian - Penggunaan nilai Yudhistira untuk merefleksikan tanggung jawab sosial dan akuntansi lingkungan belum pernah digunakan dan bermanfaat bagi pengembangannya.

Abstract - Yudhishtira's Reflection in Social Responsibility and Environmental Accounting

Main Purpose - This article aims to reflect Yudhistira's social responsibility and environmental accounting governance values.

Method - The interpretation study method with literature study is used. Yudhistira's value is used to assess social responsibility and environmental accounting governance.

Main Findings - Social responsibility and environmental accounting governance have reflected Yudhistira's five values. Balance in Yudhishtira's value components has broad impacts on society. It is important to seek justice and social welfare using local wisdom in its management.

Theory and Practical Implications - The evolution of social responsibility and environmental accounting needs to be improved. The dynamic development of ecological accounting following the development of social responsibility is beneficial for improving the alignment and related parties' responsibilities allocation.

Novelty - Reflection of Yudhistira's values on social responsibility and environmental accounting has never been used and is beneficial for its development.



Kegagalan banyak pemerintahan dalam mempersiapkan masa depan (seperti purnakarya, prasarana, otomatisasi hingga penataran ulang pekerja) telah menyebabkan tingginya ekspektasi publik terhadap organisasi, baik publik maupun swasta, untuk memberikan kinerja keuangan dan melayani tujuan sosial atau memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (Nazir et. al., 2021). Sebagai regulator dan pemegang kekuasaan tertinggi, pemerintah sebaiknya bisa menjadi pemimpin tertinggi dalam pengelolaan, sekaligus menjadi penentu kesuksesan dan kegagalan dari tujuan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara makro. Akuntansi sebagai bahasa bisnis juga dapat diperluas dari akuntansi konvensional ke akuntansi lingkungan untuk merangkum upaya perlindungan lingkungan organisasi. Teori pemegang saham sudah tidak lagi sesuai untuk pengembangan akuntansi lingkungan, sementara teori pemangku kepentingan sudah sedemikian luas. Pengaturan dan pengelolaan sumber daya tidak mudah untuk memberikan nilai ke lingkungan dan sesama yang sesuai dengan relevansi kebutuhan pemangku kepentingan (kesejahteraan sosial) dan tidak memberatkan pemangku kepentingan tertentu. Sinergi dari setiap pihak yang terlibat, keputusan regulator, kecepatan perkembangan akuntansi lingkungan tidak sebanding dengan kecepatan perkembangan kondisi sosial, kondisi lingkungan, tuntutan organisasi nasional ataupun internasional. Keputusan berkualitas tinggi perlu dibuat untuk menyelesaikan dilema dengan bijak dan efektif dalam periode kompleks dan bergejolak seperti saat ini (Alam, 2017) dengan membawa pertumbuhan dan kesejahteraan pada organisasi. Dengan demikian, penggunaan kisah Mahabharata akan dapat membantu pemimpin modern membuat keputusan yang bijaksana untuk memperluas pandangan dan makna hidup. Yudhistira sebagai tokoh raja bijaksana yang disegani dan peduli pada lingkungan dalam Mahabharata cukup sesuai untuk menginterpretasikan pengelolaan tanggung jawab sosial dengan akuntansi lingkungan, sekaligus untuk menjelaskan keseimbangan antara keduanya. Terdapat lima nilai yang diperoleh melalui tokoh Yudhistira yang dapat dijadikan alat dalam mengelola kompleksitas dan perubahan yang semakin cepat, khususnya dalam perkembangan tanggung jawab sosial dan akuntansi lingkungan pada masa mendatang.

Kegiatan tanggung jawab sosial sebaiknya tidak hanya menjadi kegiatan rutin tahunan (Winarno & Sawarjuwono, 2021) untuk menuju ekonomi rendah karbon, terlebih peningkatan pemanasan global masih terus berlanjut. Kerusakan lingkungan tersebut telah berpengaruh pada ekonomi dan sosial, sehingga perlu dihentikan dengan cara memperluas tanggung jawab tradisional (hanya berfokus ke pemegang saham) ke tanggung jawab sosial dan lingkungan (berfokus ke pemangku kepentingan, termasuk sosial dan lingkungan). Perluasan tanggung jawab ini mem-

butuhkan perluasan akuntansi tradisional (fokus satu nilai bagi investor dan bentuk implementasi teori pemegang saham) ke akuntansi lingkungan (fokus kebutuhan pemangku kepentingan). Informasi akuntansi tradisional dirancang sesuai kebutuhan penilaian kinerja manajemen, pengembalian dana, pengalokasian dividen, dan salah satu penentu harga saham, karena keuntungan investor didukung teknik distribusi kekayaan dan kekuatan ada dalam akuntansi (Chiapello, 2017). Teori pemegang saham masih kurang sesuai untuk perkembangan tanggung jawab sosial, sehingga perlu dialihkan sepenuhnya ke teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) untuk alokasi sumber daya, pengukuran, pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan aktivitas berikut dampaknya terhadap lingkungan. Pengelolaan tanggung jawab sosial yang dilengkapi dengan akuntansi lingkungan akan memberikan dampak luas yang optimal dan berkelanjutan bagi para pihak terkait, terutama untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Penyelarasan dari pengelolaan kehidupan masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan, termasuk dalam hal tanggung jawab sosial. Kelima nilai tokoh Yudhistira digunakan sebagai acuan, terdiri dari moralitas, menolong, kemampuan bekerja sama, kerendahan hati, dan simpati. Selanjutnya, analisis dan refleksi sinergi antarpihak yang relevan berikut perkembangannya dapat dilakukan secara lebih jelas. Nilai Yudhistira penting untuk meningkatkan keselarasan dan keseimbangan tanggung jawab antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, karena berimplikasi pada keadilan hak dan kewajiban, serta pemerataan distribusi kesejahteraan sosial dan lingkungan. Kemampuan bekerja sama menjadi nilai paling dominan dalam pengelolaan tanggung jawab sosial dan akuntansi lingkungan, sehingga kemajuan dinamis perlu dilengkapi akuntansi lingkungan. Perkembangan evolusi akuntansi tradisional ke akuntansi lingkungan dapat diawali dari perhitungan biaya dan kewajiban lingkungan, pengungkapan informasi nonfinansial (kebijakan akuntansi dan elemen laporan keuangan) hingga ke pengungkapan informasi kuantifikasi ekonomi, sosial, dan lingkungan, penciptaan nilai dari penggunaan kapital yang berbeda, hingga pengungkapan komprehensif dalam laporan berkelanjutan.

Kajian akuntansi alternatif dengan menggunakan nilai kearifan lokal (budaya sendiri) merupakan ruang penelitian luas untuk menghasilkan pengetahuan inovatif (Efferin, 2015; Hartono, 2016; Mulawarman & Kamayanti, 2018). Berkaitan dengan budaya Indonesia, peran penting pengelola terhadap perkembangannya akan bergantung dari tanggung jawab sosial dan perkembangan akuntansi lingkungan. Belum tersedia penelitian terdahulu tentang pengaturan tanggung jawab sosial dan akuntansi lingkungan, berikut hubungan keduanya. Keragaman

42-59 **Tabel 1 Sumber Data dan Penggunaannya dalam Analisis**

Kelompok Literatur	Sumber & Kriteria Literatur	Penggunaan dalam Analisis
Narasi Yudhistira	Artikel dan Buku Tentang: <ul style="list-style-type: none"> - Mahabharata - Pengelolaan Yudhistira sebagai raja - Nilai-nilai Yudhistira sebagai raja 	Memahami perkembangan pengelolaan tanggung jawab sosial di Indonesia.
Regulasi, laporan dan aksi pemerintah dan lembaga pemerintah	Konten pengelolaan tanggung jawab sosial dalam Laman Pemerintah dan Lembaga Pemerintah: <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang - Peraturan Pemerintah - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan - Peraturan Daerah - Laporan pemerintah dan lembaga pemerintah dalam laman 	Memahami konten dan evolusi akuntansi lingkungan.
Regulasi Ikatan Akuntan Indonesia (Dewan Standar) dan lembaga Akuntansi Internasional	Konten akuntansi lingkungan dan pengungkapan tanggung jawab sosial dalam: <ul style="list-style-type: none"> - Standar Akuntansi Keuangan - Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan - Standar akuntansi internasional 	

nilai kearifan lokal dapat digunakan untuk mengaitkan tanggung jawab sosial dengan budaya *Tri Hita Karana* (Purwati & Tenaya, 2018), budaya *Luwu* (Rismawati, 2015), budaya *Catur Purusa Artha* (Werasturi, 2017), falsafah kesenian *tanjidor* (Apriliani & Abdullah, 2018), implementasi *Maqashid Syariah* di bank (Muchlis & Sukirman, 2016), dan *Memayu Hayuning Bawana* (Winarno & Sawarjuwono, 2021). Anindita & Hamidah (2020) juga menjelaskan kunci utama keberhasilan penerapan akuntansi lingkungan kerja sama antara instansi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam menerapkan akuntansi lingkungan. Artikel ini akan mengisi kesenjangan tersebut dengan menggunakan nilai Yudhistira untuk memperluas analisis pengelolaan tanggung jawab sosial oleh pemerintah dan akuntansi lingkungan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk menjelaskan kausa dinamika perkembangan, penciptaan manfaat sosial pihak berbeda di berbagai tingkat, pengelolaan pemerintah, interaksi langsung antarpihak, dan dampak ke akuntansi lingkungan. Keberhasilan strategi bergantung pada pengaturan, yang mana pengelolaan sebagai salah satu cabang dari manajemen (Sahut et al., 2019). Secara keseluruhan, analisis ini mengawali pemahaman bagaimana inisiatif dan

kolaborasi antarpihak dalam menciptakan nilai bersama. Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu dan memperluas nilai kearifan lokal di mana organisasi beroperasi.

Artikel ini bertujuan untuk menyajikan kajian interpretasi pengelolaan dan pengembangan tanggung jawab sosial dan akuntansi lingkungan dari kelima nilai Yudhistira. Konsep ini memberikan kebaruan dalam pembahasan pengelolaan tanggung jawab sosial dengan menggunakan nilai kearifan lokal, serta memberikan kontribusi pada pengembangan tanggung jawab sosial dan akuntansi lingkungan secara seimbang dan memiliki keselarasan pemberian nilai ke masyarakat, serta pentingnya untuk dapat segera mengubah fokus pemberian nilai akuntansi dari *shareholder* (investor) menjadi masyarakat relevan (sosial dan lingkungan).

METODE

Penelitian ini menggunakan analisis literatur. Kajian kualitatif deskriptif dimulai dengan mendeskripsikan nilai-nilai penting tokoh Yudhistira dalam cerita Mahabharata dan menganalisis pengelolaan pemerintah yang berdampak pada tanggung jawab sosial dan akuntansi lingkungan, kemudian menginterpretasikan

hasilnya. Pemahaman tulisan menyediakan pemahaman metafora (Ricoeur & Thompson, 2016). Salah satu jenis penyelidikan narasi (*narrative inquiry*) adalah penyelidikan menggunakan narasi tertulis dari aksi sosial untuk mencapai sesuatu seperti promosi perubahan sosial (Chase, 2018), dengan melalui analisis isi secara manual.

Tabel 1 berisi rincian kelompok literatur, sumber, dan kriteria, serta penggunaannya dalam analisis. Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa tahapan penelitian dimulai dengan pengumpulan sumber-sumber informasi mengenai tokoh Yudhistira dalam epos Mahabharata. Tahapan berikutnya dilanjutkan dengan mengidentifikasi referensi yang tepat untuk nilai (karakter) dari tokoh Yudhistira yang sesuai dengan pengelolaan. Setelah mendapatkan nilai (karakter) tokoh Yudhistira, dikumpulkanlah data pendukung untuk masing-masing nilai tokoh Yudhistira, seperti kerja sama, regulasi-regulasi, dan standar terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta praktik-praktik tanggung jawab sosial dan akuntansi lingkungan di Indonesia. Literatur dikumpulkan berdasarkan keterkaitan dengan kelompok literatur.

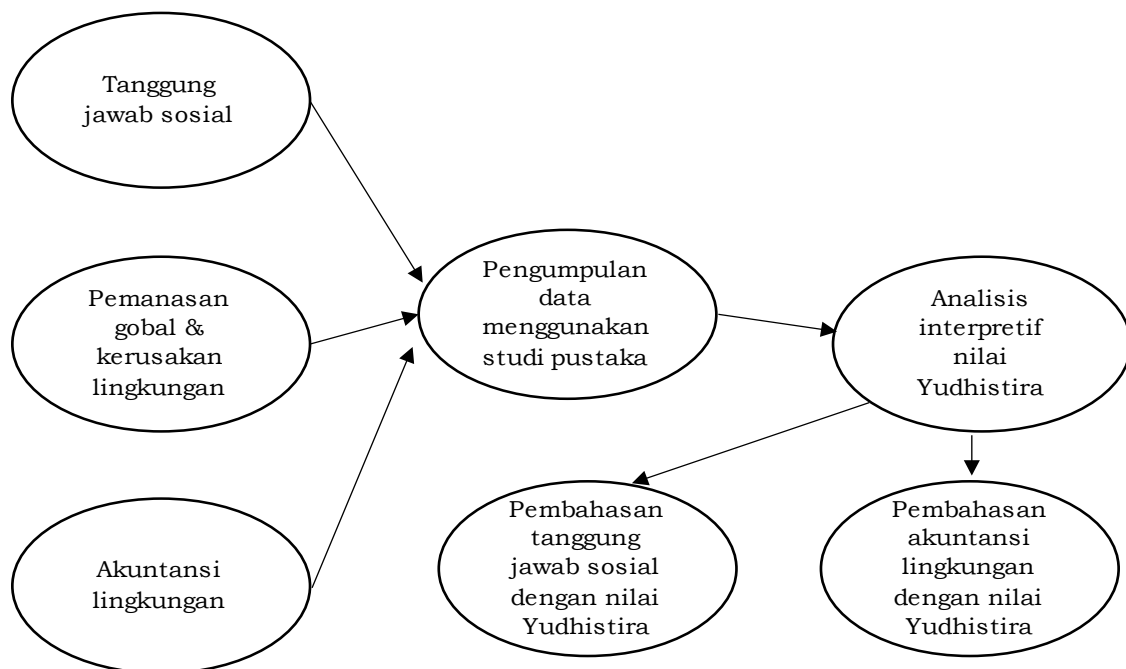
Gambar 1 menyajikan sistematika analisis dan pembahasan penelitian ini. Tahapan penelitian selanjutnya yaitu analisis perkembangan manajemen tanggung jawab sosial oleh pemerintah Indonesia dan perkembangan akuntansi lingkungan oleh IAI, serta menginterpretasikan kedua hal tersebut ke dalam nilai tokoh Yudhistira. Nilai acuan diperoleh setelah mengidentifikasi tokoh Yudhistira dalam Epos Mahabharata yang tidak hanya memiliki nilai kepahlawanan, tetapi juga memuat nilai manajemen dan pengelolaan

yang dapat digunakan untuk mengembangkan tanggung jawab sosial dan akuntansi lingkungan dengan mengupayakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Tahapan pembahasan awal diisi dengan deskripsi tanggung jawab sosial dan tokoh Yudhistira. Setelah itu, tahap pembahasan berikutnya adalah pengelolaan tanggung jawab sosial oleh pemerintah dan akuntansi lingkungan yang dimulai dengan pengertian hasil analisis (temuan interpretasi) dengan mengacu ke lima nilai Yudhistira.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung jawab sosial. Pemaknaan dari tanggung jawab sosial sangatlah luas. Pengertian tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah “komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi organisasi sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya” (UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1). Tampak bahwa pada aturan ini masih hanya terbatas pada perseroan. Sehingga dalam penggunaan pengertian pelaku yang lebih luas, pengertian tanggung jawab sosial akan menjadi suatu konsep tentang cara perusahaan dalam menyeimbangkan komitmen-komitmen kepada pemangku kepentingan organisasional dalam lingkungannya, yaitu kelompok-kelompok dan individu-individu yang relevan (Ebert & Griffin, 2019).

Perusahaan mencakup berbagai bentuk permodalan (tidak hanya perseroan). Rujukan relevan terhadap para pemangku kepentingan yang terdampak langsung dari aktivitas perusa-



Gambar 1. Sistematika Analisis dan Pembahasan

haan, mulai dari investor, *supplier*, konsumen, pelanggan, karyawan, masyarakat sekitar (komunitas lokal), dan bisa diperluas sampai komunitas internasional. Penggunaan istilah *corporate social responsibility* juga perlu diubah menjadi istilah *social responsibility*, sebab individu, ukuran perusahaan kecil, dan organisasi sosial yang tidak merusak lingkungan atau tidak memberikan dampak buruk ke masyarakat juga dapat melakukan tanggung jawab sosial, seperti tenaga pendidik dan mahasiswa dari yayasan pendidikan yang bersifat nirlaba melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan dipicu oleh kebutuhan masyarakat sekitar atau komunitas tertentu. Adapun wujudnya pun dapat sangat beragam, seperti pengajaran, inkubator, dan lain sebagainya sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. Jadi, TJS adalah konsep tentang cara individu dan organisasi berperan dalam memberikan manfaat ke masyarakat dan lingkungan sekitar, khususnya kepada pemangku kepentingan organisasional dalam lingkungannya yang relevan.

Pemerintah (lokal, propinsi, dan negara/pusat) dapat mempengaruhi bisnis secara langsung melalui regulasi dan secara tidak langsung melalui insentif pajak dan insentif lainnya. Sementara itu, perusahaan bisnis akan dapat mempengaruhi pemerintah melalui *lobbying*, perwakilan rakyat, dan dukungan fasilitas untuk aktivitas pemerintah. Pengelolaan tanggung jawab sosial oleh pemerintah (negara) sebagai manajemen puncak dan analisisnya perlu dilakukan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur tertentu dari pemimpin negara, seperti nilai dari tokoh Yudhistira yang merupakan seorang raja.

Perlunya nilai tokoh Yudhistira. Mahabharata merupakan karya sastra populer tentang kearifan lokal masyarakat Hindu yang mudah dipahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan. Meskipun berlatar di lingkungan negara Hindustan, Mahabharata telah dikenal luas di dunia dan ditranslasikan ke dalam berbagai bahasa. Mahabharata yang beredar di masyarakat Indonesia termaktub dalam kitab suci Weda (Ariyoga, 2019), filsafat Jawa yang diejawantahkan dalam bentuk karya sastra, seperti wayang kulit, wayang golek purwa di Jawa Barat (Anjasmara, 2018), Wawacan Mahabharata di Sunda (Alam, 2017), filsafat Bali, novel, film, buku pendidikan dan pembinaan watak peserta didik secara nasional oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mulai 1994, serta lain sebagainya.

Kompleksitas nilai Epos Mahabharata mencakup religiusitas, budaya, alam, dan komunal (Ariyoga, 2019). Epos Mahabharata juga telah memposisikan bahwa kebenaran adalah milik banyak golongan dan tersedia banyak rute untuk memandang atau menggapai kebenaran dengan berdasar pada toleransi (Buck, 2019). Epos Mahabharata pun turut memberi nasihat tentang kesejahteraan sosial tanpa batas yang diperoleh dengan perjuangan tanpa mementingkan kepen-

tingan individu. Mahabharata merupakan epos hasil ciptaan Bhagawan Wyasa tentang kisah pertempuran besar bangsa Bharata antara saudara sepupu Pandawa dengan Kaurawa (Kurawa) di Kerajaan Kuru. Pandawa yang merupakan putra Pandu menjadi tokoh protagonis dengan lima persaudaraannya yang berurut dari Yudhistira, Bhima, Arjuna, Nakula, dan Sahadewa. Sedangkan yang menjadi tokoh antagonisnya adalah Kurawa, yang terdiri dari 100 orang putra Dritarastra dengan anak sulung yang bernama Duryodhana.

Tokoh Yudhistira memiliki banyak nama lain, seperti Darmakusuma, Samiaji, Puntadewa, dan Dharmawangsa (Purna et al., 1995). Yudhistira diartikan sebagai pemilik keteguhan hati dan iman di medan pertempuran (Buck, 2019), yang dihormati lantaran keteguhan hati, keadilan, dan kemuliaan wibawa, serta sangat bijaksana (Arifin & Hakim, 2021). Tokoh Yudhistira juga menjadi tokoh dengan paling banyak karakteristik yang menonjol. Delapan karakteristik tokoh Yudhistira yang menonjol adalah jujur, baik dan lembut, tidak pernah membentak-bentak, tidak pernah bertengkar, tidak pernah menolak permintaan seseorang, suka mengalah, ikhlas dan pasrah, serta mengutamakan musyawarah (Kaswadi, 2015). Negara hasil pemerintahan Yudhistira makmur sejahtera dan selalu menegakkan keadilan dengan memperjuangkan kesejahteraan sosial. Karakteristik individu ini bisa disesuaikan dengan karakteristik individu pemimpin di masing-masing daerah dan pengelola organisasi.

Selain karakteristik individu, masih terdapat nilai yang lebih luas dan dapat digunakan oleh individu dan organisasi untuk mengelola suatu hal, organisasi, atau daerah. Nilai budi tokoh Yudhistira yang dirangkum dalam lima nilai, yang terdiri dari moralitas, menolong, kemampuan bekerja sama, kerendahan hati, dan simpatik (Anjasmara, 2018). Berkaitan dengan nilai pertama tentang moralitas, analisis moral manusia kepada diri pribadi tergambar dari sifat-sifat yang dimiliki oleh tokoh Yudhistira yang jujur, bijaksana, teguh pendirian, sabar, setia, tidak egois, dan bersahaja. Analisis moral manusia terhadap sesama manusia dengan tidak mengambil hak orang lain, dan analisis moral manusia terhadap alam tergambar dari sikap para tokoh dalam memanfaatkan sesuatu yang berhubungan dengan alam, termasuk dalam memanfaatkan tumbuh-tumbuhan (Alam, 2017). Berkaitan dengan nilai kedua tentang menolong, tindakan baik Yudhistira diperlihatkan dalam bentuk hadiah-hadiah hiburan yang diberikan kepada janda dan yatim dari pertempuran, mendapatkan respon kepercayaan dari perwira tentara, pelayan, dan anugerah dari brahmana. Hal tersebut dapat ditafsirkan sebagai pemberian sedekah sesuai dengan kebutuhan penerima. Berkaitan dengan nilai ketiga tentang kemampuan bekerja sama (*cooperation*), tampak dalam kerja sama antara kelima anggota Pandawa dan tawaran persahabatan dengan pihak Kurawa

untuk menghindari perang. Meskipun memiliki hubungan buruk dengan Kurawa di masa lalu, Yudhistira tetap menawarkan adanya kerja sama, namun ditolak oleh Duryodhana (pihak Kurawa). Penolakan ini memicu perang besar antara pihak Pandawa terhadap Kurawa untuk memperjuangkan pengembalian hak-hak Pandawa. Berkaitan dengan nilai keempat tentang kerendahan hati (*modesty*), saat memasuki keraton (istana), Yudhistira tidak menggunakan kereta atau gajah dan tidak mempunyai budak. Berkaitan dengan nilai kelima tentang simpatik (*sympathy*), Yudhistira menunjukkan keikutsertaannya dalam merasakan duka (kesedihan) dari Raja Distarashtra dan Dewi Gandhari karena kematian 100 anak sebagai akibat perang besar, serta duka dari rakyatnya atas kematian anggota keluarga yang ikut berperang.

Yudhistira memerintah kerajaannya dengan keadilan yang sempurna dan keluhuran budi (Kaswadi, 2015). Setelah kemenangan perang, Yudhistira menjadi raja dengan kebaikan budi yang memerintah berdasarkan dharma, kebajikan dan kearifan, hidup dan bekerja di antara manusia, mengatur pemerintahan dan memikirkan kesejahteraan rakyat (Buck, 2019). Nilai Yudhistira dapat diterapkan dalam manajemen untuk individu, perusahaan, pemerintahan, dan organisasi lain. Dalam nilai Yudhistira, keselarasan dengan alam menjadi salah satu perhatian. Hal ini menyebabkan nilai (karakter) Yudhistira sebagai nilai kearifan lokal dapat digunakan sebagai dasar analisis pengelolaan (keputusan) tanggung jawab sosial dan akuntansi lingkungan dalam periode dan lingkungan kompleks, serta keterlibatan pemangku kepentingan.

Pengelolaan tanggung jawab sosial pemerintah. Dalam sejarah, umat manusia tidak akan pernah memiliki keinginan untuk berhenti mengeksploitasi planet untuk memberikan keuntungan bagi pemilik kapital. Sementara itu, perubahan iklim global akan mengancam kondisi alam dan menjadi isu kritis dan penting. Pemanasan global jangka panjang terjadi dengan cepat, yang mana tampak dalam peningkatan suhu sebesar 1,1 derajat celcius pada tahun 2021 bila dibandingkan rata-rata akhir abad 19. Eksploitasi tanpa tanggung jawab kepada lingkungan dan sosial perlu diatur, karena berdampak pada kerusakan lingkungan, perekonomian, dan sosial (masyarakat). Hal ini perlu diselenggarakan dengan keadaan sosial dan lingkungan dengan pengaturan berlandaskan nilai Yudhistira.

Negara sebagai pemilik legitimasi atau penguasa dapat melaksanakan kewibawaan (otoritas) untuk menata masyarakat dan mengarahkannya menuju hidup yang lebih baik, serta untuk dapat bergabung dengan orang lain demi memperbesar cakupan kebebasan dan membangun keadilan dalam lembaga-lembaga sebagaimana tujuan dari etika politik (Handoyo et al., 2016). Kaidah, kerja sama, dan program-program tersebut perlu disinergikan untuk meng-

hadapi perubahan lingkungan dan sosial, karena akan berdampak ke ekonomi, bisnis, sosial, lingkungan, dan akuntansi lingkungan. Pada bagian ini, nilai Yudhistira dapat berguna dalam memberikan interpretasi terhadap pengelolaan guna kebijaksanaan yang mengatur tanggung jawab sosial. Pada Tabel 2 disajikan ringkasan dari lima nilai Yudhistira sebagai raja yang dapat diterapkan oleh pengelola atau manajemen, yang dalam hal ini yaitu pemerintah Indonesia. Deskripsi pengelolaan tanggung jawab sosial yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia dapat diklasifikasikan dengan lima nilai Yudhistira secara berurutan.

Nilai pertama, moralitas yang tergambar dari keteguhan dan konsistensi pemerintah untuk mengatur pemanfaatan alam dan sosial berdasarkan nilai moral yang ada. TJS perlu diinisiasi dan dilaksanakan dengan penuh integritas oleh pemerintah dengan mengerahkan segala upaya untuk menyelaraskan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, agar memberikan keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat pada masa sekarang dan masa depan. Pengelolaan pemerintah akan mengarahkan perusahaan menghadapi praktik bisnis yang berkesinambungan.

Pemerintah perlu fokus pada aspek implementasi kebijakan yang terkait dengan nilai dan manfaat konservasi keanekaragaman hayati bagi produsen saat disertifikasi, serta meningkatkan keterlibatan dengan pemangku kepentingan (Astari & Lovett, 2019). Kendati masih terdapat beberapa pihak yang memberikan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, antara lain partai politik, kalangan pebisnis, dan kekuatan asing. Pengelolaan (*governance*) yang baik berarti pemerintah dapat mengelola kebutuhan warga, atas nama, demi, dan untuk rakyat dengan cara keterlibatan, keterbukaan, mangkus dan sangkil, kesamaan, kebebasan, akuntabilitas, dan responsibilitas (Handoyo et al., 2016). Perusahaan patut mengalokasikan manfaat ke pemangku kepentingan (Nazir et. al., 2021).

Berkaitan dengan moralitas, konsistensi pengelolaan pemerintah Indonesia tampak dalam aturan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada tataran tingkat UU dan PP dengan rentang waktu yang cukup lebar dari 2007, kemudian 2009, 2012 dan 2021. Pasal 3 (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 mengimbau investasi modal berawasan lingkungan diselenggarakan sebagai salah satu asasnya. Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 juga telah mengatur beban pelestarian lingkungan perseroan sehingga usaha perseroan yang berasosiasi dengan alam dipaksa untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kewajiban Perseroan tersebut memperhatikan penganggaran, perhitungan biaya perseroan, serta kelayakan dan kelaziman dalam pelaksanaan. Sanksi dikenakan pada Perseroan yang tidak menjalankan kewajiban ini. Semua pasal dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Penge-

lolaan Lingkungan Hidup. Pasal 2 PP Nomor 47 Tahun 2012 mengenai TJS dan Lingkungan Perseroan Terbatas tentang kewajiban perusahaan melaporkan aktivitas pertanggungjawaban sosial dan lingkungan menyatakan bahwa “setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Semua pasal PP Nomor 22 Tahun 2021 mengatur persetujuan, perlindungan dan pelaksanaan kualitas dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup (seperti air, udara, laut), manajemen limbah, dan data penanggung untuk perbaikan fungsi lingkungan hidup.

Nilai kedua, menolong yang tergambar dari pendampingan kepada perusahaan yang tidak mampu, pemberian bantuan ekonomi dan sosial bagi masyarakat yang terdampak parah, dan upaya konservasi lingkungan. Pendampingan dapat dimaknai secara luas, misalnya melalui adanya pengarahan dari pemerintah kepada perusahaan, pengadaan kegiatan tanggung jawab sosial bersama dengan perusahaan ukuran kecil dan menengah sesuai dengan dampak merugikan yang dihasilkan dan kemampuan perusahaan, agar dapat memberikan manfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk semua ukuran perusahaan, pemerintah dapat memberikan buku panduan (*manual book*) pengelolaan tanggung jawab sosial. Pelaksana tanggung jawab sosial seharusnya tidak dipartisi pada perseroan terbatas. Perusahaan dengan jenis permodalan yang lain, bahkan individu, dapat melestarikan alam, mengurangi limbah, dan menjaga kualitas fungsi lingkungan hidup.

Berkaitan dengan upaya menolong, terdapat aturan terhadap semua perusahaan untuk memberdayakan masyarakat, yaitu PMLHK No 16 Tahun 2020 mengenai rencana strategis Kementerian LHK Tahun 2020-2024, bahwa program restorasi tanah gambut oleh masing-masing instansi pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat. Selain itu, Kementerian LHK juga merencanakan pemulihan lingkungan berdasarkan tingkat kekritisannya lahan.

Nilai ketiga, kemampuan bekerja sama yang tergambar dari peran aktif dan kerja sama holistik antara elemen pemerintah, organisasi nasional, organisasi internasional, dan masyarakat. Kerja sama di antara organisasi pemerintahan bisa diwujudkan dengan adanya kerja sama antartingkatan pemerintah (pemerintah pusat dengan pemerintah daerah), antardepartemen pemerintah, badan usaha milik pemerintah, dan lembaga negara lain seperti lembaga pengawas sektor finansial, yaitu OJK. Kerja sama pemerintah dengan organisasi independen nasional seperti dewan standar akuntansi, yaitu IAI dalam bentuk *output* standar yang mengakomodasi aturan-aturan pemerintah. Kerja sama pemerintah dengan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, G20, ataupun organisasi lainnya.

Sehingga terdapat komunikasi dengan perusahaan-perusahaan penghasil emisi, limbah, atau polusi.

Berkaitan dengan kemampuan bekerja sama, uraian kerja sama pemerintah dengan berbagai pihak akan dituliskan dalam beberapa alinea berikut secara berurutan, kecuali kerja sama dengan IAI yang akan dibahas dalam bagian tersendiri. Koordinasi pemerintah melalui lembaga OJK tampak dalam komitmen OJK untuk membangun keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) dengan mengubah pola pikir bisnis biasa ke bisnis yang lebih ramah lingkungan. Keuangan berkelanjutan ialah patronasi komprehensif dari bidang jasa finansial untuk mengkonkretkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui penyerasian relevansi ekonomi, sosial, dengan lingkungan hidup (POJK Nomor 51 Tahun 2017). Perencanaan (*roadmap*) keuangan berkelanjutan OJK terbagi dalam dua tahap, yaitu tahap I periode 2015-2019 dan tahap II periode 2021-2025. Adapun tahap dalam mengorientasikan sektor jasa finansial secara taktis dan sistematis untuk terlibat dan berperan positif dalam proses pembangunan berkelanjutan akan bertumpu pada konsep *triple bottom line*, yaitu laba, manusia, dan bumi. Pengelolannya juga dilakukan dalam bentuk penerbitan regulasi pendukung penerapan Keuangan Berkelanjutan, seperti POJK Nomor 51 Tahun 2017 dan POJK Nomor 60 Tahun 2017 akan Obligasi Hijau. Selain itu, pada tahun 2020, OJK mengeluarkan pedoman dan kebijakan terkait insentif pembiayaan kendaraan listrik untuk mendorong partisipasi perbankn nasional. Implikasi kebijakan TJS merupakan hal penting dalam pasar modal karena dapat membawa modal kepercayaan sosial ke perusahaan dan meningkatkan *return* saham pada era pandemi Covid-19 dengan memberikan tanggung jawab perlindungan lingkungan dan perlindungan karyawan (Bae et al., 2021). Kemudian yang berkaitan dengan komposisi tim manajemen puncak, diversitas jenis kelamin (pria dan wanita) memberikan kontribusi dalam strategi lingkungan (Orazalin & Baydauletov, 2020). Saat komposisi dewan mayoritas didominasi orang eksternal dan hanya satu orang internal perusahaan (direktur atau CEO) dalam kasus di Amerika Serikat, dewan tersebut mungkin tidak dapat secara efektif memantau keputusan tanggung jawab sosial dari CEO, sehingga memungkinkan CEO untuk terlalu terlibat dalam CSR demi keuntungannya sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham (Bu et al., 2021). Sehingga regulasi OJK perlu diperluas ke tanggung jawab perlindungan lingkungan, perlindungan karyawan, dan diversitas tim manajemen puncak.

Organisasi membutuhkan adanya buku pedoman atau manual TJS perusahaan dari pemerintah Indonesia. Misalnya, pemerintah Kanada membuat pedoman TJS untuk memastikan bah-

Tabel 2 Konsep Lima Nilai Yudhistira

Nilai	Konsep
Moralitas	Keteguhan dan konsistensi dalam mengatur pemanfaatan sumber daya berdasarkan nilai moral yang ada.
Menolong	Derma, pemberian ke keluarga korban sesuai kebutuhan.
Kemampuan Bekerja Sama	Upaya menjalin kerja sama untuk menghindari hal buruk atau kerugian pada masa mendatang.
Kerendahan Hati	Tidak menggunakan simbol kemewahan.
Simpatik	Keikutsertaan merasakan perasaan duka karena kehilangan.

wa masalah dan peluang CSR dikelola dengan baik di tingkat dewan, sehingga dapat mewakili risiko dan peluang yang signifikan terhadap kinerja perusahaan dan diintegrasikan ke dalam tata kelola dewan untuk melindungi kepentingan jangka panjang pemangku kepentingan (termasuk pemegang saham). Pedoman tersebut juga berisi fase-fase dan langkah-langkah memulai tata kelola tanggung jawab sosial yang baik. Senior manajemen perlu menjawab daftar pertanyaan seputar TJS yang ada dalam pedoman tersebut. Pemerintah Kanada juga telah menggabungkan TJS dengan tata kelola sehingga lebih komprehensif. Saat ini pemerintah Indonesia memiliki *The Indonesia Corporate Governance Manual* Edisi 1 dan Edisi 2 yang berfokus terhadap tata kelola yang baik di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain mengintegrasikan TJS dengan buku pedoman tata kelola, pemerintah juga dapat mengembangkan pedoman yang lebih ringkas dan sederhana bagi pengusaha (individu dan perusahaan) yang tidak terdaftar di BEI dan/atau tidak berbentuk perseroan.

Koordinasi pemerintah pusat, badan usaha milik negara (BUMN), dan organisasi internasional tampak dalam program-program BUMN yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah. Hal ini dicontohkan dengan salah satu BUMN berukuran besar di Indonesia, yaitu PT Tambang Batu Bara Tbk (PTBA) yang menerapkan *environmental, social, and governance* (ESG) untuk keberlanjutan dan ketahanan dari energi nasional dan bisnis. Perusahaan merespon tuntutan global terkait pemanasan global dan pengayoman target pemerintah Indonesia sampai pada *net zero carbon*. Bersamaan dengan itu, diimplementasikan pula regulasi internasional yang mengacu pada *United Nation Sustainability Development Goal's* (UN SDG's), ESG, dan Prinsip Penambangan *International Council on Mining and Metals* (ICMM) dalam proses-proses bisnis perusahaan. Kemudian pemerintah menjalin kerja sama multilateral dalam forum G20. Saat artikel ini ditulis, Indonesia menjadi Presidensi G20 selama satu tahun yang dimulai pada 1 Desember 2021 dan akan menjadi penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi tahun 2022 di Bali, yang salah satu agenda prioritasnya adalah *sustainable finance* dengan pembahasan tentang risiko iklim dan risiko transisi ke ekonomi rendah karbon, serta keuangan

berkelanjutan dari titik pandang makro ekonomi dan kestabilan finansial.

Koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah tampak dari adanya turunan regulasi dari pemerintah pusat ke perda tentang penyelenggaraan TJS perusahaan. Contohnya, UU Nomor 40 Tahun 2007 diturunkan menjadi perda tentang penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan semua pasalnya berkaitan dengan prinsip, ruang lingkup, bentuk, program, penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat, pembiayaan, dan sebagainya. Beberapa perda tentang penyelenggaraan TJS dan lingkungan perusahaan, di antaranya yaitu Perda Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017 dan Perda Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2019. Peraturan seperti ini juga perlu dikoordinasikan pemerintah daerah dengan badan usaha milik daerah (BUMD).

Nilai keempat, kerendahan hati yang tergambar dari upaya pemerintah untuk mengutamakan kesederhanaan dalam program kegiatan dan pembangunan yang dilakukan, tanpa menghilangkan tujuan utama untuk tanggung jawab sosial, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Dalam upaya memotivasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah memberikan kesederhanaan dengan cara memberikan insentif dan disinsentif berbasis kinerja ekologi kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha (perusahaan dan individu). Data acuan yang bisa digunakan, yaitu seperti data informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (IKPLHD) sebagai dasar perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Bagi pemerintah daerah, data tersebut dapat digunakan untuk menyusun kebijakan dan mereformulasi alokasi anggaran daerah dengan membandingkan antara investasi yang dikeluarkan dengan manfaat dan insentif fiskal yang akan diterima (Kristianto, 2020). Insentif diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2017. Insentif non-moneter yang dapat diperoleh adalah nama baik (citra), yang dapat diperoleh melalui PROPER (PMLKH Nomor 1 Tahun 2021) dalam bentuk ajang penghargaan dari Kementerian LHK melewati Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Nilai kelima, simpatik yang tergambar dari upaya pemerintah dan seluruh lembaga pemerintahan untuk melakukan penghematan energi

dan konsumsi sumber daya lainnya dalam operasi harian. Artinya, pemerintah tidak sekadar memberikan imbauan kepada masyarakat untuk hemat energi. Adapun besaran tanggung jawab konservasi energi yang dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pebisnis, dan masyarakat adalah sama seperti yang dituliskan dalam PP Nomor 70 Tahun 2009 tentang pelestarian energi.

Berbagai perkembangan lingkungan dalam negeri (nasional) dan luar negeri (internasional) telah memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan tata kelola tanggung jawab sosial. Lingkungan yang dimaksud adalah kondisi lingkungan dalam bentuk perubahan iklim, organisasi regional (misal ASEAN), organisasi internasional (seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, G20, dan sebagainya), perubahan teknologi, dan perubahan lain. Perubahan-perubahan ini mempengaruhi perubahan cara pandang, kebijakan, regulasi, dan perkembangan tanggung jawab sosial suatu negara, kemudian berdampak pada tanggung jawab sosial para pelaku (individu dan organisasi). Dampak perubahan itu akan berbeda sesuai kondisi budaya masyarakat. Berikut adalah gambaran budaya masyarakat Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang memiliki dimensi jarak kekuasaan (*power distance*) yang tinggi, dimensi masyarakat kolektif, dimensi maskulin yang rendah, dimensi tidak menyukai ambiguitas (ketidakpastian), dimensi budaya pragmatis, dan dimensi tindakan dibatasi oleh norma-norma sosial (Nohl, 2019). Hal-hal tersebut perlu menjadi perhatian pengambil keputusan. Berkaitan dengan dimensi jarak kekuasaan, masyarakat mengandalkan pemimpin bersifat direktif, kontrol manajemen, dan delegasi, sehingga pemerintah selaku manajemen negara perlu selalu mengelola dan mengatur pelaksanaan tanggung jawab sosial.

Berkaitan dengan dimensi masyarakat kolektif, ada preferensi individu yang tinggi untuk menyelaraskan diri dengan harapan masyarakat dan kelompok tempat asal. Penyusunan dan pemberlakuan regulasi cocok dilaksanakan dengan seragam dan serentak. Apabila tidak dimungkinkan secara serentak, maka regulasi dapat diberlakukan secara bertahap untuk perusahaan-perusahaan seindustri. Susunan program tanggung jawab sosial oleh pemerintah daerah, perusahaan daerah, cabang perusahaan bisa disesuaikan berdasarkan kearifan lokal masing-masing daerah. Idealnya, tanggung jawab sosial akan menjadi penyeimbang aktivitas perusahaan dengan komunitas dan nilai kearifan lokal (Firmansyah et al, 2021; Rismawati, 2015). Nilai kearifan lokal, masyarakat adat, dan komunitas lokal perlu diikutsertakan dalam program tanggung jawab sosial. Analisis manfaat bagi pemangku kepentingan diaplikasikan dari sisi internal (pemegang saham dan karyawan) dan eksternal (pemegang saham, pelanggan, dan komunitas tempat mereka beroperasi) (Nazir et. al., 2021).

Berkaitan dengan dimensi maskulin yang rendah, masyarakat berciri dengan adanya kepedulian terhadap sesama dan kualitas hidup, serta “gengsi” dari proyeksi penampilan luar. Aura “gengsi” ini dapat disukseskan dengan ajang pemberian penghargaan yang diselenggarakan oleh pemerintah (seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR) *Healthcare Award* dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) dan swasta (seperti *Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibility Award* (BISRA) 2021 dari Perusahaan Surat Kabar Bisnis Indonesia). Perusahaan akan saling bersaing untuk tampil mengesankan agar mendapatkan dan/atau mempertahankan “gengsi”. Para pemangku kepentingan akan diuntungkan dari persaingan “gengsi” tersebut.

Berkaitan dengan dimensi tidak menyukai ambiguitas, situasi yang ambigu atau tidak diketahui akan menimbulkan penghindaran. Peran pemerintah adalah dengan memberikan kepastian dalam bentuk regulasi, petunjuk teknis, dan manual book. Pemerintah juga dapat berperan sebagai mediator pada saat ada konflik antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan yang merasa dirugikan. Konflik yang berkepanjangan akan meningkatkan ketidakpastian. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan mekanisme perantara untuk pengaduan pelanggaran dan ketidakharmonisan lainnya, seperti jalur pengaduan dengan melindungi identitas pelapor untuk menghindari konfrontasi langsung, serta menindaklanjuti dengan bijak.

Berkaitan dengan dimensi budaya pragmatis, perubahan kondisi dapat disesuaikan dengan cukup baik, serta memiliki tendensi kuat untuk menyisihkan uang, menanam modal, irit, dan ulet dalam mencapai hasil. Perubahan tidak direspon dengan kecurigaan tinggi. Hal ini menjadi kesempatan yang baik untuk menggelorakan tanggung jawab sosial ke semua perusahaan dengan bijaksana. Program tanggung jawab sosial tidak dibatasi oleh nominal target tertentu yang disesuaikan dengan kerusakan yang diakibatkan perusahaan sehingga perusahaan masih menyisakan sumber daya, tabungan, dan investasi. Peran akuntansi lingkungan akan sangat dibutuhkan untuk hal ini.

Berkaitan dengan dimensi terakhir, norma-norma sosial membatasi tindakan masyarakat dan tindakan memanjakan diri sendiri merupakan aktivitas yang salah. Masyarakat akan lebih menghargai program tanggung jawab sosial di bidang pemulihan kondisi alam (lingkungan), religi, kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, sosial, mitra usaha, pendampingan usaha mandiri, pelestarian kebudayaan, dan sebagainya. Kontrol kuat ini dapat digunakan untuk desain program tanggung jawab sosial, seperti pemberian keterampilan usaha, kemampuan kerajinan, program pendampingan bisnis, inkubator bisnis, dan sebagainya.

Berbagai pengelolaan kehidupan masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan,

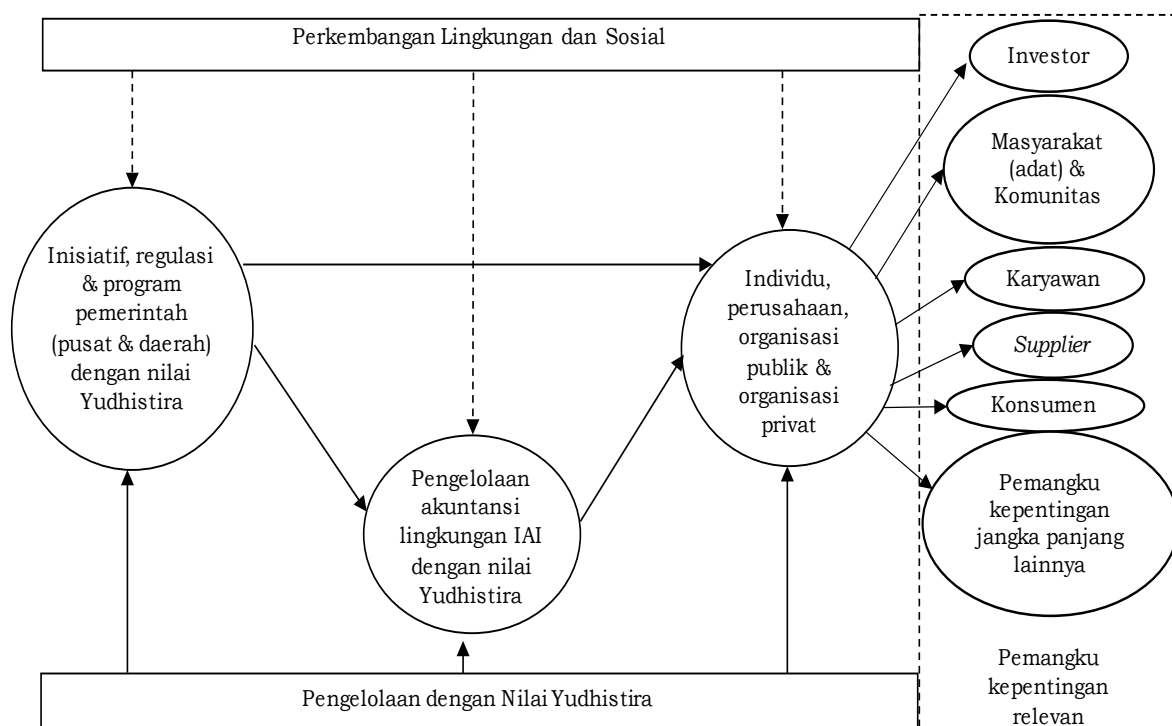
termasuk penyelarasan tanggung jawab sosial dengan mengacu ke lima nilai milik tokoh Yudhistira (moralitas, menolong, kemampuan bekerja sama, kerendahan hati, dan simpatik). Keseimbangan semua nilai tersebut penting untuk dipertahankan dan dievaluasi secara berkala untuk meningkatkan keselarasan beban dan tanggung jawab antara pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan karena berimplikasi pada keadilan hak dan kewajiban, serta pemerataan distribusi kesejahteraan sosial. Nilai koordinasi merupakan nilai yang paling banyak dikembangkan dalam pengelolaan pemerintah karena melibatkan kerja sama dengan pelaku (organisasi) dalam negeri dan luar negeri, serta berkaitan dengan implementasi standar-standar internasional. Keterlibatan banyak pihak dalam tanggung jawab sosial menyebabkan perkembangan yang dinamis dalam tanggung jawab sosial, seperti munculnya berbagai inovasi di dalamnya.

Dengan menggunakan nilai-nilai Yudhistira, pengelolaan berbagai ragam tanggung jawab sosial dapat dilakukan, termasuk inovasi dalam tanggung jawab sosial. Inovasi dari TJS dapat diperoleh dari kolaborasi antara individu, organisasi, dengan perusahaan (Helmhout, 2021; Herrera, 2015; Mirvis et al., 2016). Selain regulasi, tanggung jawab sosial juga mempengaruhi perusahaan ketika dapat dikampanyekan sebagai dukungan pada relevansi nilai (dibandingkan manajemen risiko, atau altruism) (Ahmed & Mohti, 2021). Relevansi nilai berkaitan dengan penguatan posisi pasar dan meningkatkan laba perusahaan dalam jangka panjang (Aluchna & Roszkowska, 2019). Perkembangan ini perlu dilengkapi

dengan adanya akuntansi lingkungan yang mampu mengakomodasi kebutuhan para pemangku kepentingan, khususnya investor bagi perusahaan privat.

Perkembangan akuntansi lingkungan masih terus berlanjut untuk menghitung biaya dan kewajiban lingkungan, serta pengungkapan informasi nonfinansial dari tanggung jawab sosial. Sebagai alat alokasi sumber daya dan mengikuti perkembangan tanggung jawab sosial, akuntansi terus berevolusi dari akuntansi tradisional ke akuntansi lingkungan, termasuk dalam pengungkapan informasi dari kebijakan akuntansi dan elemen laporan keuangan hingga ke pengungkapan informasi kuantifikasi ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta penciptaan nilai dari penggunaan kapital-kapital yang berbeda hingga pengungkapan komprehensif (*comprehensive corporate reporting*) dalam laporan keberlanjutan. Berdasarkan uraian dalam alinea-alinea sebelumnya, tanggung jawab sosial sangat membutuhkan dukungan akuntansi sebagai alat dan memberikan pengaruh ke akuntansi lingkungan.

Pengeluaran sumber daya untuk aktivitas tanggung jawab sosial pemerintah dan perusahaan membutuhkan akuntansi sebagai alat untuk mendukung pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Fokus Informasi lingkungan dan sosial belum tercakup dalam akuntansi tradisional, sehingga terjadi perubahan dari akuntansi tradisional yang hanya berisi pelaporan keuangan menjadi akuntansi lingkungan telah meluas ke pengungkapan keuangan terkait keberlanjutan. Gambar 2 menunjukkan hubungan ini. TJS dan akuntansi lingkungan berkaitan



Gambar 2. Konsep Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial

dengan keadilan dan kesejahteraan sosial karena memberikan nilai kepada lingkungan dan sesama sesuai dengan kebutuhannya.

Akuntansi lingkungan. Akuntansi merupakan teknik distribusi kekayaan dan kekuatan (Chiapello, 2017) yang berguna untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dalam jangka pendek (Speziale, 2019). Konsep ini diawali sejak perubahan struktur modal perusahaan. Pemegang saham memberikan sejumlah dana dari perusahaan dan berhak untuk klaim nilai residual. Hal ini sesuai dengan teori pemegang saham (*shareholder theory* atau *stockholder theory*), yang menjelaskan tentang pemaksimalan nilai pemegang saham yang dilakukan oleh manajemen (Hooks & Stewart, 2015). Nilai pemegang saham berkaitan dengan dividen dan harga saham. Pemegang saham selaku pemangku kepentingan memiliki kedudukan superior dibanding pemangku kepentingan lain, seperti karyawan, pemasok, pelanggan, dan masyarakat. Laporan keuangan dirancang untuk memenuhi pemaksimalan nilai pemegang saham. Saat akuntansi tradisional berevolusi ke akuntansi lingkungan, acuan teori pemegang saham juga perlu berevolusi menjadi teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*).

Teori pemangku kepentingan merupakan pandangan yang menggunakan unit analisis dari hubungan antara bisnis dengan kelompok-kelompok dan individu jamak yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh bisnis untuk menyelesaikan masalah-masalah bisnis (Miles, 2017). Teori pemangku kepentingan banyak digunakan dalam pembahasan laporan terintegrasi (Speziale, 2019). Penyedia modal finansial tertarik dengan nilai untuk investor (teori pemegang saham) dan nilai untuk pemangku kepentingan dan masyarakat (teori pemangku kepentingan) (Flower, 2015). Dukungan dari pemangku kepentingan juga signifikan dalam mempengaruhi kemampuan organisasi untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham dan berkaitan dengan ketahanan jangka panjang. Sebagai bagian dari akuntansi lingkungan, pengungkapan tanggung jawab sosial akan menarik bagi pemegang saham (investor). Selain itu, evolusi ini dibantu dengan adanya regulasi pengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan yang semakin luas selaras dengan peningkatan dalam permintaan publik dan menghindari fokus tunggal pada pemaksimalan kekayaan pemegang saham keuangan jangka pendek (Buchholz et al., 2018). Perubahan hukum diperlukan untuk memudahkan praktik teori ini.

Akuntansi lingkungan merupakan akuntansi yang memperhatikan biaya-biaya lingkungan oleh pemangku kepentingan dalam usaha menurunkan biaya dan secara bersamaan juga membenahi kualitas lingkungan (Gunarathne & Hitigala, 2021). Akuntansi lingkungan bertujuan untuk menyeimbangkan perlakuan dari kos lingkungan dan manfaat dari praktik akun-

tansi konvensional. Akuntansi lingkungan berisi perhitungan biaya, pembuatan laporan keuangan, sampai dengan pengungkapan informasi lingkungan. Sebagai alat distribusi kesejahteraan, akuntansi lingkungan memiliki kebermanfaatannya bagi kesejahteraan para pemangku kepentingan dan keberlanjutan usaha. Perluasan akuntansi konvensional ke akuntansi lingkungan membutuhkan waktu cukup lama.

Nilai akuntansi lingkungan mencakup nilai bagi investor, nilai bagi pemangku kepentingan, dan nilai bagi masyarakat (Flower, 2015). Akuntansi lingkungan masih bisa berkembang dengan memberikan tingkatan nilai berikutnya, yaitu nilai bagi generasi sekarang dan yang akan datang (*sustainability*). Hal ini menyebabkan akuntansi lingkungan membutuhkan ukuran atau instrumen keuangan yang dapat mendeteksi variabel lingkungan (Dhar & Chowdhury, 2021) dan pelaporan (pengungkapan) informasi lingkungan (Speziale, 2019). Implikasinya, akuntansi lingkungan perlu diterapkan oleh pemerintah, organisasi publik, dan organisasi privat.

Akuntansi lingkungan yang dikembangkan oleh Thornton (1993) sering disebut sebagai akuntansi hijau (*green accounting*) yang berguna untuk mengkritik kekurangan akuntansi keuangan, dengan pengembangan berikutnya masih oleh Thornton (2013). Berkaitan dengan tanggung jawab sosial, pemerintah membangun sistem *cap-and-trade markets* untuk polutan. Berkaitan dengan akuntansi, beliau mengusulkan adanya liabilitas tambahan yang disebabkan oleh perubahan regulasi dengan mendebit akun ekuitas dan mengkredit akun liabilitas (menghasilkan pengurangan dalam ekuitas pemegang saham), serta perusahaan menerbitkan prospektus yang menguraikan peluang dan risiko bagi calon investor, termasuk kewajiban pensiun aset (*asset-retirement obligations* atau ARO). *International Accounting Standard 37* (IAS 37) yang diadopsi pada September 1998 dan mulai berlaku setelah 01 Juli 1999 menjadi bagian dari Standar Pelaporan Keuangan Internasional. IAS 37 berisi persyaratan serupa untuk mencatat "kewajiban konstruktif" dari ARO sebagai kewajiban yang sama dengan nilai sekarang dari perkiraan biaya masa depan untuk membersihkan lingkungan, dan sebagai tambahan pada biaya aset terkait (misalnya, ladang minyak). Adapun pengukuran ARO telah dilakukan secara andal.

Ide Thornton (1993, 2013) adalah melengkapinya ARO dari perusahaan dengan *Omniscient Critical Accountant* (OCA) yang dicatat dalam pembukuan negara terkait ekonomi tertutup yang didasarkan pada asumsi bahwa penerapan doktrin *promissory estoppel* memberikan kesamaan tingkat perbaikan lingkungan yang diwajibkan oleh pemerintah atas nama warga. Pencatatan OCA dilakukan dengan mendebit akun piutang dari perusahaan dan mengkredit akun ekuitas warga (*citizens' equity*) sebesar nilai ARO. Penentuan komposisi, nilai aset, dan kewajiban pemerintah

umumnya akan bergantung pada ideologi partai politik yang berkuasa. Ide ini sulit diterapkan dalam ekonomi terbuka yang melibatkan lebih dari satu negara.

Kedua artikel tersebut cukup fenomenal dan mendapatkan beberapa kritik, seperti beberapa pendapat yang menghambat perkembangan akuntansi lingkungan berikut ini. Akuntansi keuangan konvensional merupakan sistem pembukuan entri ganda dasar yang hanya tertarik pada biaya/harga transaksi dan kategori akuntansi yang dapat dialokasikan sehingga biasanya dapat mengabaikan karakteristik lain dari transaksi (Lehman & Kuruppu, 2017). Akuntansi lingkungan mengarah pada komodifikasi biosfer (Ulupui et al., 2020). Selain itu, bentuk kepedulian lingkungan yang dilaporkan berasal dari negara kapitalis sehingga memunculkan penolakan pengungkapan lingkungan karena dianggap bagian dari kapitalis (Phillips, 2019). Akuntansi (pelaporan) kinerja sosial dan lingkungan yang dikaitkan dengan pasar dianggap tidak mungkin terjadi, namun pendapat ini diubah dalam tulisan (Deegan, 2017). Pengungkapan lingkungan dianggap sebagai sinyal yang disampaikan oleh pihak internal ke pihak eksternal yang membuat pihak internal dapat memilih untuk menyampaikan sinyal baik atau buruk, serta sinyal kamuflase sehingga laporan keberlanjutan dianggap sebagai salah satu kamuflase (Santamaria et al., 2021). Meskipun ada manfaat dari pengeluaran (biaya) untuk lingkungan, para pemilik modal masih bisa menolak akuntansi lingkungan ketika tidak dipengaruhi oleh para pembuat kebijakan. Peran pembuat kebijakan di tingkat nasional (negara) menjadi pihak utama yang membantu penyebaran ide dan implementasi akuntansi lingkungan. Hal ini menunjukkan kompleksitas dari tanggung jawab sosial dan akuntansi lingkungan sehingga pengelolaannya perlu diinterpretasikan dengan nilai Yudhistira sampai saat ini dan masa mendatang.

Kelima nilai Yudhistira yang terdiri dari nilai moralitas, menolong, kemampuan bekerja sama, kerendahan hati, dan simpatik untuk diinterpretasikan pada akuntansi lingkungan telah dipenuhi IAI. Nilai pertama, moralitas tampak dalam perubahan, penyesuaian PSAK dan ISAK. Nilai kedua, menolong tampak dari konsultasi dan pendampingan implementasi pedoman akuntansi dan aplikasi sistem akuntansi bagi *pilot project*.

Berkaitan dengan akuntansi lingkungan, koordinasi IAI dengan *International Accounting Standards Board* dalam bentuk melakukan adopsi IAS 37 dilakukan melalui penyesuaian ISAK 9 pada tahun 2014. Selain itu, koordinasi pemerintah pusat dengan IAI tampak dalam PSAK dan ISAK yang merespon perubahan regulasi pemerintah. Sebagai contoh, ISAK No. 9 mengenai perubahan atas liabilitas aktivitas purnapenerasi, restorasi, dan liabilitas serupa. Apabila ada aturan baru pemerintah terkait biaya lingkungan, maka IAI telah menyiapkan ISAK No. 9, yang

mana perusahaan mencatat adanya kewajiban diestimasi terkait pembersihan dari pencemaran lingkungan. Kemudian IAI juga mengatur pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan keberlanjutan dan berkembang menjadi laporan terintegrasi. Hal ini menunjukkan akomodasi kepentingan umum oleh IAI dengan menerbitkan pedoman mengenai akuntansi lingkungan, termasuk pengukuran kewajiban konstruktif perusahaan terkait ekosistem (PSAK No. 57), perlakuan akuntansi terhadap pengeluaran-pengeluaran selama eksplorasi dan evaluasi pertambangan sumber daya mineral (PSAK No. 64). Setiap PSAK yang belum disahkan selalu disampaikan dalam bentuk draft sehingga mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan.

Perusahaan yang berkegiatan usaha terkait dengan alam tidak hanya diharuskan untuk menerapkan keuangan berkelanjutan, tetapi masih diharuskan juga untuk membuat laporan keberlanjutan (*sustainability report* atau SR) sebagai pelengkap laporan keuangan tahunan dalam bentuk satu kesatuan atau terpisah. Perusahaan yang berkegiatan usaha utama tidak berkaitan dengan alam juga diwajibkan melalui POJK No. 51 Tahun 2017 (*annual report*). Hal ini dikarenakan bahwa Laporan Keberlanjutan adalah laporan yang disebarkan ke publik dan diisi informasi capaian ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup milik lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik dalam mengelola bisnis secara berkesinambungan (POJK No. 51 Tahun 2017 pasal 1[13]). SR berlaku sejak secara bertahap sejak periode laporan tahun 2019 dan mengacu ke *Global Reporting Initiative (GRI) Standards*. Kuantifikasi capaian ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup menunjukkan usaha dan dampak tanggung jawab sosial sehingga pembaca laporan keuangan dapat menilai dan menganalisis data kinerja tanggung jawab sosial tersebut.

Untuk meningkatkan keterbacaan, konsep laporan keberlanjutan diubah menjadi laporan/pelaporan terintegrasi (*integrated reporting*). Pelaporan terintegrasi merupakan laporan singkat dan terpadu mengenai rencana, pengelolaan, renumerasi, kinerja, dan prospek suatu organisasi dalam menghasilkan pembuatan nilai selama masa pendek, menengah, dan panjang untuk menjelaskan upaya penciptaan nilai dari waktu ke waktu kepada penyedia modal. Laporan keberlanjutan menjadi dasar penyusunan pelaporan terintegrasi. Pelaporan terintegrasi merupakan bentuk kerja sama IAI dengan *International Integrated Reporting Council (IIRC)*. Pelaporan terintegrasi belum diterapkan dan merupakan konsep baru yang menggunakan kerangka prinsip pelaporan terintegrasi dari IIRC. Dalam kerangka prinsip pelaporan terintegrasi, terdapat enam jenis modal entitas yang bisa digunakan untuk penciptaan nilai yang terdiri dari modal finansial, modal manufaktur, modal intelektual, modal ma-

nusia, modal sosial dan hubungan, serta *natural capital* (International Integrated Reporting Council, 2021).

Kerja sama IAI juga diadakan dengan IFRS Foundation Trustee yang mengelola International Accounting Standards Boards (IASB) dan International Sustainability Standards Boards (ISSB), yang kemudian membentuk Climate Disclosure Standards Board (CDSB) dan memiliki program carbon disclosure project (CDP). Sebagai wujud komitmen terhadap isu perubahan iklim, PTBA mendapatkan pendampingan penyusunan Laporan CDP-Climate Change dari lembaga CDP. Semua hal ini menunjukkan kemampuan bekerja sama yang sangat baik dan sesuai dengan nilai ketiga dari Yudhistira.

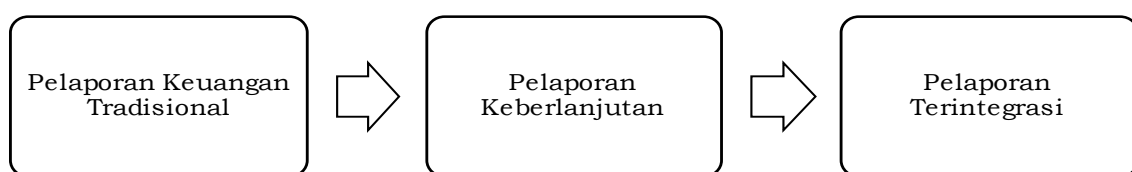
Gambar 3 menunjukkan evolusi akuntansi sebagai pelaporan keuangan tradisional menjadi akuntansi lingkungan telah meluas ke pengungkapan keberlanjutan (*sustainability reporting*), kemudian pelaporan ekonomi, sosial, pengelolaan (*Economic, Social, & Governance* atau ESG). Pelaporan keberlanjutan menjadi pelengkap laporan tahunan (pelaporan keuangan tradisional). Setelah itu, akuntansi akan berkembang menjadi Pelaporan terintegrasi (*integrated reporting*) pengungkapan keuangan terkait keberlanjutan. Dalam hal pengungkapan informasi non-finansial ini, IAI mengacu pada pengelolaan International Sustainability Standards Board (ISSB). Saat ini, OJK baru mewajibkan laporan keberlanjutan untuk semua perusahaan yang tercatat di BEI sejak 2019. Untuk memberikan nilai kepada pemangku kepentingan, pemerintah dan IAI memerlukan peningkatan kecepatan perubahan ini karena tanggung jawab sosial yang dilengkapi dengan akuntansi lingkungan akan memberikan manfaat yang lebih luas.

Gambar 4 menunjukkan bahwa evolusi fokus pelaporan dari pelaporan akuntansi tradisional (teori pemegang saham) menjadi pengungkapan keberlanjutan global akuntansi lingkungan telah meluas ke pengungkapan keberlanjutan. Kemajuan pengungkapan laporan keuangan tampak sangat jelas dalam evolusi pelaporan informasi nonfinansial. Adapun perluasan perubahan ini lebih berfokus pada banyak pemangku kepentingan. Berkaitan dengan laporan keberlanjutan, perusahaan industri sering melaporkan praktik lingkungan mereka, terutama manajemen emisi, melaporkan praktik ekonomi secara eksklusif dalam kaitannya dengan kinerja ekonomi mereka, dan melaporkan praktik sosial yang berfokus pada pengembangan

pemangku kepentingan internal mereka (Santamaria et al., 2021). Pengungkapan keberlanjutan ini mensyaratkan pelaporan keberlanjutan yang lebih luas dari investor. Selain itu, pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola dilihat lebih sebagai manajemen risiko (Chiu & Wang, 2015).

Pada tahap berikutnya, pengungkapan ini akan diperluas dengan mencakup pelaporan kebijakan publik ke pemangku kepentingan. Investor sebagai pemegang saham merupakan pemilik sesungguhnya dari perusahaan (Nazir et al., 2021), sehingga menjadi fokus utama pelaporan. Kemudian prioritas berikutnya adalah pemangku kepentingan lainnya, seperti masyarakat adat (Blesia et al., 2021), komunitas, karyawan, *supplier*, konsumen, dan sebagainya. Tahapan perubahan fokus pelaporan keuangan dari fokus investor (penyedia dana), keberlanjutan dengan fokus investor menjadi pelaporan keberlanjutan (fokus banyak pemangku kepentingan) selaras dengan evolusi akuntansi tradisional sebagai akuntansi lingkungan. Selain itu, desain ini selaras dengan peralihan teori pemegang saham menjadi teori pemangku kepentingan. Fokus pemegang saham (investor) diperluas secara bertahap menjadi fokus pemangku kepentingan relevan. Pemangku kepentingan relevan digambarkan dalam Gambar 2 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial.

Kecepatan perubahan pelaporan akuntansi konvensional dalam bentuk pelaporan keuangan tradisional (teori pemegang saham) ke akuntansi lingkungan berupa laporan keberlanjutan berfokus banyak pemangku kepentingan (teori pemangku kepentingan) sudah mulai dilakukan. Untuk menyerahkan laporan ke para pemangku kepentingan yang relevan dan manfaat bagi pelaku tanggung jawab sosial, dibutuhkan adanya dukungan pemerintah, terutama ketika manfaat dari pengeluaran (biaya) untuk lingkungan belum kentara dan kondisi budaya masyarakat yang tidak menyukai ambiguitas (ketidapastian). Selain menggunakan regulasi dan standar akuntansi keuangan, digunakan pula ajang penghargaan untuk laporan keberlanjutan untuk meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan karena terkait dengan budaya “gengsi”. Salah satu ajang pemberian penghargaan bagi organisasi yang melaporkan kinerja keberlanjutan pada pemangku kepentingan melalui laporan keberlanjutan dengan baik yang diadakan oleh National Center for Sustainability Reporting (NCSR) adalah Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA) mulai tahun 2005 dan berubah menjadi Asia Sustainability Report Rating (ASRRAT) mulai 2018. Di



Gambar 3. Evolusi Pelaporan Nonfinansial

Indonesia, NCSR ialah institusi otonom perdana yang menumbuhkan pelaporan keberlanjutan.

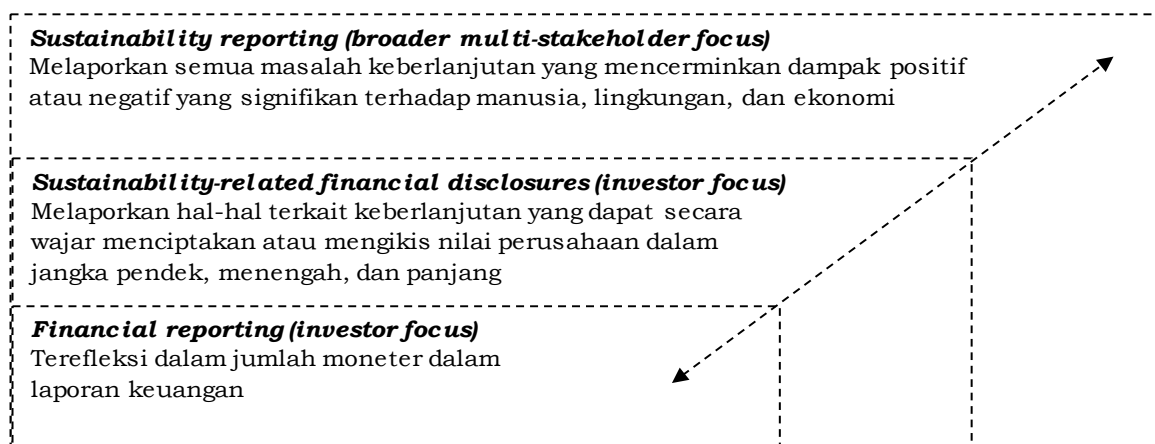
Keseimbangan pengelolaan akuntansi lingkungan meliputi aktivitas pengukuran, pencatatan, dan pengungkapan perlu diupayakan. Peralihan dari jenis pelaporan keberlanjutan ke pelaporan terintegrasi perlu diikuti dengan kepercayaan dari penyusun laporan keuangan (Chaidali & Jones, 2017), terlebih banyaknya pengembangan dari masing-masing aktivitas tersebut masih belum sebanding. Pengungkapan merupakan aktivitas akuntansi yang paling banyak dikembangkan. Peta jalan evolusi pengungkapan informasi telah jelas. Sementara itu, regulasi dan pengawasan TJS wajib pemerintah mempengaruhi investasi lingkungan perusahaan swasta (Farooq et al., 2021). Hal ini membutuhkan perubahan pencatatan beban tanggung jawab sosial menjadi investasi agar tidak menjadi beban pada suatu periode (Prahara & A'yuni, 2021). Selain itu, berkaitan dengan konsep modal dalam konteks akuntansi ekologis, sumber daya tenaga kerja dicatat seperti pengakuan aset mesin yang dapat didepresiasi (Rambaud & Richard, 2015).

Dengan mengacu pada nilai-nilai Yudhistira, perkembangan akuntansi lingkungan di Indonesia didominasi nilai kemampuan kerja sama antara dewan standar akuntansi keuangan (IAI) dengan organisasi standar akuntansi internasional, pemerintah, dan para pemangku kepentingan. Nilai ketiga Yudhistira ini (kemampuan bekerja sama) tidak berimbang ketika dibandingkan dengan nilai-nilai yang lain yang masih minimal. Keseimbangan lima nilai Yudhistira akan mengarahkan perkembangan akuntansi lingkungan untuk semua organisasi, yang berarti bahwa tidak hanya untuk organisasi privat (organisasi berorientasi laba) yang tercatat di bursa efek saja. Akuntansi lingkungan juga dapat diterapkan untuk akuntansi pemerintahan, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Harmonisasi antara dan antarmanusia, budaya, alam, nilai etik dan agama ditekankan dalam ke-

arifan lokal pada era digital dan modernitas (Sharon & Paranoan, 2020).

Peran regulasi (hukum) dan kerja sama pemerintah, IAI, dan asosiasi/organisasi nonpemerintah dibutuhkan dalam upaya untuk menjaga keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Keberlanjutan dapat dikelola di negara-negara produsen dan di sepanjang rantai nilai (Bager & Lambin, 2020; Thornton, 2013). Evolusi akuntansi lingkungan sebagai alat alokasi sumber daya masih terus berlanjut mengikuti perkembangan tanggung jawab sosial dan standar internasional. Selain itu, implementasi akuntansi lingkungan yang melibatkan lebih banyak kerja sama antarpihak akan meminimalkan konflik (penolakan) dari pengambil keputusan dan pembuat laporan, dan bermanfaat untuk semua pihak. Perkembangan akuntansi lingkungan internasional disesuaikan dengan perubahan lingkungan dan sosial, perkembangan pengelolaan tanggung jawab sosial Indonesia, dan kesiapan sumber daya pelaku tanggung jawab sosial (pembuat laporan keuangan) dalam negeri. Perkembangan dan penyebaran selanjutnya dikonsistenkan pada teori pemangku kepentingan dan pengelolaan dengan mengacu kelima nilai Yudhistira secara seimbang, sebagai salah satu alat untuk mengupayakan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Upaya keberlanjutan lingkungan dan sosial perlu diimbangi dengan kemampuan dan keberlanjutan bisnis (ekonomi) pembuat laporan keuangan. Hal ini membutuhkan pengelolaan yang baik agar dapat mendukung alokasi tanggung jawab, pengambilan keputusan, mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial.

Temuan penelitian ini sesuai dengan teori pemangku kepentingan yang berfokus pada jalinan hubungan baik pemangku kepentingan dan penyelesaian masalah-masalah lingkungan dan sosial yang ditimbulkan dari aktivitas-aktivitas organisasi. Selain itu, penelitian ini sesuai dengan penelitian-penelitian terdahulu tentang tanggung jawab sosial dan akuntansi lingkungan dalam hal



Gambar 4. Evolusi Fokus Pelaporan

Sumber: IFRS Foundation (2021:6)

penggunaan kearifan lokal untuk penginterpretasian, yaitu Anindita & Hamidah (2020), Apriliani & Abdullah (2018), Muchlis & Sukirman (2016), Rismawati (2015), Werasturi (2017), dan Winarno & Sawarjuwono (2021). Penggunaan hasil temuan penelitian ini dapat menjadi temuan yang menambah keberagaman kajian penelitian sebelumnya. Nilai pengelolaan Yudhistira mengutamakan keselarasan dengan alam dan masyarakat untuk menghasilkan kesejahteraan dari hubungan antara organisasi, bisnis dengan sosial dan lingkungan. Keseimbangan nilai-nilai baik dalam kearifan lokal tanggung jawab sosial dan akuntansi lingkungan perlu segera dimanifestasikan dalam pengelolaan oleh regulator dan partisipasi dari berbagai pihak terkait.

SIMPULAN

Kompleksitas dan perubahan lingkungan menyebabkan adanya kebutuhan akan tanggung jawab sosial, dan akuntansi lingkungan. Dengan refleksi lima nilai kearifan lokal Yudhistira (moralitas, menolong, kemampuan bekerja sama, kerendahan hati, dan simpatik), tanggung jawab sosial dan akuntansi lingkungan telah diupayakan dengan baik oleh pemerintah dan regulator akuntansi. Moralitas merupakan konsistensi pemanfaatan sumber daya berdasarkan nilai moral yang ada. Menolong merupakan derma. Kemampuan bekerja sama merupakan kerja sama untuk menghindari kerugian pada masa mendatang. Kerendahan hati merupakan kesederhanaan. Simpatik merupakan keikutsertaan merasakan duka. Tanggung jawab sosial dan akuntansi lingkungan perlu dikelola secara berimbang dengan mengikuti dinamika dunia dari berbagai jenis organisasi tanpa memberatkan pelaksana. Nilai selain kemampuan bekerja sama perlu ditingkatkan, sehingga keseimbangan nilai Yudhistira dapat terwujud. Kemudian juga dibutuhkan inisiatif dan kolaborasi antara pemerintah, sektor publik, dan sektor swasta yang relevan dan berfokus pada pemangku kepentingan untuk menciptakan inovasi dan nilai bersama guna menghasilkan keputusan bijaksana terkait tanggung jawab sosial dan akuntansi lingkungan yang berbasis nilai-nilai Yudhistira.

Pengembangan dan implementasi tanggung jawab sosial yang merupakan tugas dari pemangku kepentingan harus relevan dengan budaya dan kearifan lokal. Harmonisasi antarmanusia, budaya, alam, nilai etik dan agama ditekankan dalam kearifan lokal. Sinergi antarpihak diperlukan untuk menciptakan inovasi. Pemerintah sebaiknya memberikan arah dan pengaruh ke pembuat standar dan pelaku bisnis. Sementara itu, regulator akuntansi seharusnya memberikan pengaruh ke akuntansi lingkungan. Penyelesaian dilema dengan bijak dan efektif dengan pengambilan keputusan yang reflektif dan tidak reaktif merupakan jawaban atas perubahan dan ketidakpastian yang cepat. Kemanfaatan bersama

diciptakan oleh pihak yang berbeda di tingkat individu, organisasi, dan masyarakat. Interaksi antarpihak juga menjadi solusi untuk memberikan manfaat lingkungan dan sosial yang berkelanjutan kepada pemangku kepentingan yang relevan dan berdampak ke akuntansi lingkungan. Inovasi tanggung jawab sosial dan akuntansi lingkungan bermanfaat untuk pengambilan keputusan alokasi sumber daya, keadilan, kesejahteraan sosial, dan berdampak pada keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi.

DAFTAR RUJUKAN

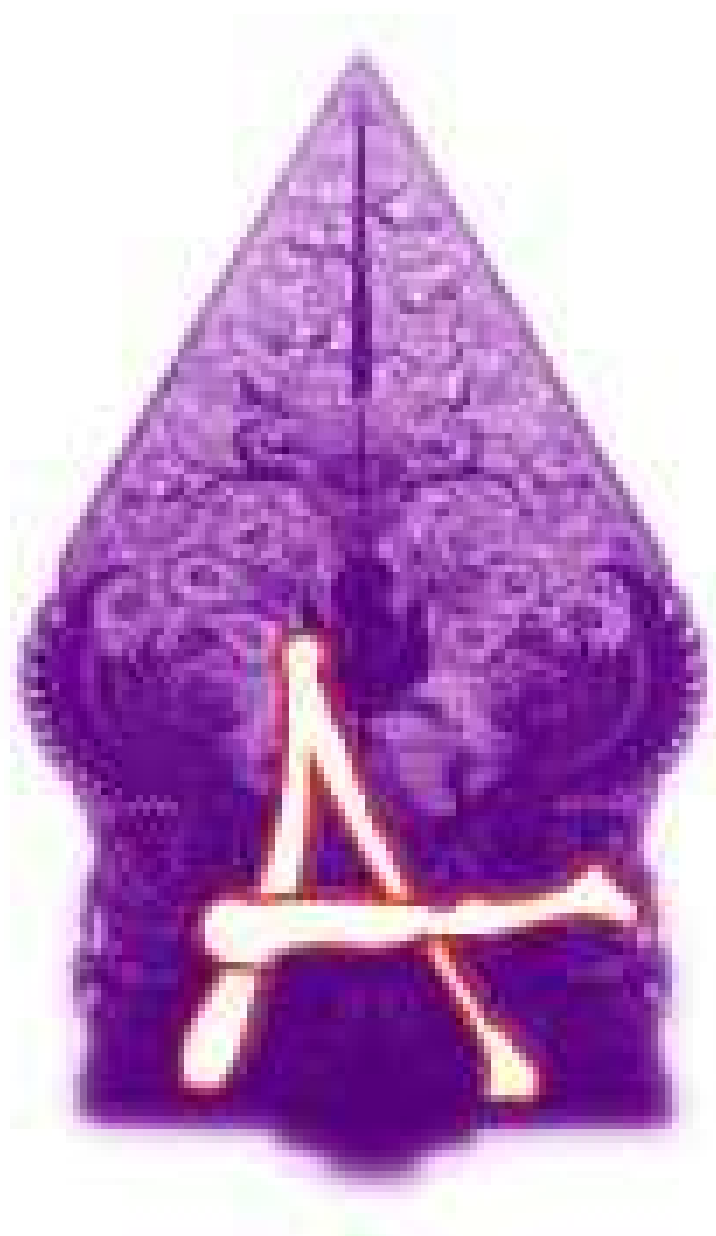
- Ahmed, M., & Mohti, W. (2021). Impact of Managerial Entrenchment on Corporate Social Responsibility: The Moderating Role of Political Embeddedness and Board Independence. *Asian Journal of Business and Accounting*, 14(2), 1-29. <https://doi.org/10.22452/ajba.vol14no2.1>
- Alam, F. S. N. (2017). Wawacan Mahabarata Karya R. Memed Sastrahadiprawira dkk. (Kajian Struktural dan Etnopedagogik). *Lokabasa*, 8(1), 39-44. <https://doi.org/10.17509/jlb.v8i1.15966>
- Aluchna, M., & Roszkowska, M. M. (2019). Integrating Corporate Social Responsibility and Corporate Governance at the Company Level: Towards a Conceptual Model. *Engineering Economics*, 30(3), 349-361. <https://doi.org/10.5755/J01.EE.30.3.17511>
- Anindita, R., & Hamidah, H. (2020). Akuntansi Lingkungan dalam Pitutur Luhur Kejawen. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 278-296. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.17>
- Anjasmara, A. (2018). Kajian Tokoh Wayang Golek Purwa dan Pemanfaatannya sebagai Bahan Ajar dalam Menyampaikan Pengajaran Sastra untuk Meningkatkan Nilai-Nilai Budi Pekerti Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 12(1), 96-113. <https://doi.org/10.25134/fjpbsi.v12i1.1532>
- Apriliani, M., & Abdullah, M. W. (2018). Falsafah Kesenian Tanjidor pada Pelaksanaan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 377-393. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9023>
- Ariyoga, I. N. (2019). Nilai Pendidikan Agama Hindu dalam Lontar Swargarohana Parwa. *Sa-tya Widya: Jurnal Studi Agama*, 2(1), 67-81. <https://doi.org/10.33363/swjsa.v2i1.59>
- Astari, A. J., & Lovett, J. C. (2019). Does the Rise of Transnational Governance 'Hollow-Out' the State? Discourse Analysis of the Mandatory Indonesian Sustainable Palm Oil Policy. *World Development*, 117, 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.12.012>
- Bae, K., El Ghoul, S., Gong, Z. J., & Guedhami, O. (2021). Does CSR Matter in Times of Crisis? Evidence from the COVID-19 Pan-

- demic. *Journal of Corporate Finance*, 67, 101876. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101876>
- Bager, S. L., & Lambin, E. F. (2020). Sustainability Strategies by Companies in the Global Coffee Sector. *Business Strategy and the Environment*, 29(8), 3555-3570. <https://doi.org/10.1002/bse.2596>
- Blesia, J. U., Wild, S., Dixon, K., & Lord, B. R. (2021). Corporate Community Relations and Development: Engagement with Indigenous Peoples. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 12(4), 811-845. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-10-2018-0278>
- Bu, L., Chan, K. C., Choi, A., & Zhou, G. (2021). Talented Inside Directors and Corporate Social Responsibility: A Tale of Two Roles. *Journal of Corporate Finance*, 70. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2021.102044>
- Buchholz, F., Jaeschke, R., Lopatta, K., & Maas, K. (2018). The Use of Optimistic Tone by Narcissistic CEOs. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 31(2), 531-562. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-11-2015-2292>
- Buck, W. (2019). *Mahabharata*. Univesity of California Press.
- Chaidali, P. Penny, & Jones, M. J. (2017). It's a Matter of Trust: Exploring the Perceptions of Integrated Reporting Preparers. *Critical Perspectives on Accounting*, 48, 1-20. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2017.08.001>
- Chase, S. E. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5th Ed.). SAGE Publications, Inc.
- Chiapello, E. (2017). Critical Accounting Research and Neoliberalism. *Critical Perspectives on Accounting*, 43, 47-64. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2016.09.002>
- Chiu, T., & Wang, Y. (2015). Determinants of Social Disclosure Quality in Taiwan: An Application of Stakeholder Theory. *Journal of Business Ethics*, 129(2), 379-398. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2160-5>
- Deegan, C. (2017). Twenty Five Years of Social and Environmental Accounting Research Within Critical Perspectives of Accounting: Hits, Misses and Ways Forward. *Critical Perspectives on Accounting*, 43, 65-87. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2016.06.005>
- Dhar, S., & Chowdhury, F. M. A. (2021). Impact of Environmental Accounting Reporting Practices on Financial Performance: Evidence from Banking Sector of Bangladesh. *International Journal of Asian Business and Information Management*, 12(1), 24-42. <https://doi.org/10.4018/IJABIM.20210101.0a2>
- Ebert, R. J., & Griffin, R. W. (2019). *Business Essentials* (12th Ed.). Pearson Education, Inc.
- Efferin, S. (2015). Akuntansi, Spritualitas dan Kearifan Lokal Beberapa Agenda Penelitian Kritis. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3), 466-480. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6037>
- Farooq, U., Ahmed, J., Tabash, M. I., Anagreh, S., & Subhani, B. H. (2021). Nexus between Government Green Environmental Concerns and Corporate Real Investment: Empirical Evidence from Selected Asian Economies. *Journal of Cleaner Production*, 314, 128089. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128089>
- Firmansyah, A., Andriyani, Fibri, A., Mahrus, M. L., Febrian, W., & Jad, P. H. (2021). Biaya Modal Perusahaan di Indonesia: Tanggung Jawab Sosial dan Tata Kelola Perusahaan. *Jurnal Ekonomi*, 26(3), 371-388. <https://doi.org/10.24912/je.v26i3.796>
- Flower, J. (2015). The International Integrated Reporting Council: A story of Failure. *Critical Perspectives on Accounting*, 27, 1-17. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2014.07.002>
- Gunarathne, A. D. N., Lee, K. & Hitigala Kaluarachchilage, P. K. (2021). Institutional Pressures, Environmental Management Strategy, and Organizational Performance: The Role of Environmental Management Accounting. *Business Strategy and the Environment*, 30(2), 825-839. <https://doi.org/10.1002/bse.2656>
- Handoyo, E., Susanti, M. H., & Munandar, M. A. (2016). *Etika politik*. Widya Karya Press.
- Hartono, A. (2016). Multiparadigma dalam Penelitian Akuntansi: Suatu Tinjauan Konsep. *Ekilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 7(1), 59-69. <https://doi.org/10.24269/ekuilibrium.v7i1.29>
- Helmhout, A. S., Chappin, M. M. H., & Rodrigues, S. B. (2021). Corporate Social Innovation in Developing Countries. *Journal of Business Ethics*. <https://doi.org/10.1007/s10551-021-04933-x>
- Herrera, M. E. B. (2015). Creating Competitive Advantage by Institutionalizing Corporate Social Innovation. *Journal of Business Research*, 68(7), 1468-1474. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.01.036>
- Hooks, J., & Stewart, R. (2015). The Changing Role of Accounting: From Consumers to Shareholders. *Critical Perspectives on Accounting*, 29, 86-101. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2015.03.001>
- IFRS Foundation. (2021). *Synergies between Sustainability and Financial Reporting* (IFRS - GSG). <https://g20sfwg.org/wp-content/uploads/2021/08/2021-IFRS-GSG.-Synergies-between-sustainability-and-financial-reporting.pdf>
- Kaswadi, K. (2015). Paradigma Ekologi dalam Kajian Sastra. *Paramasastra: Jurnal Ilmiah Bahasa Sastra dan Pembelajarannya*, 2(2), 31-45. <https://doi.org/10.26740/paramasastra.v2n2.p25p25p>
- Kristianto, A. H. (2020). Sustainable Development Goals (Sdgs) dalam Konsep Green Economy

- untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Berbasis Ekologi. *Business, Economics and Entrepreneurship*, 2(1), 2020, 27-38. <https://doi.org/10.16021/b.e.e.v2i1.134>.
- Lehman, G., & Kuruppu, S. C. (2017). A Framework for Social and Environmental Accounting Research. *Accounting Forum*, 41(3), 139-146. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2017.07.001>
- Miles, S. (2017). Stakeholder Theory Classification: A Theoretical and Empirical Evaluation of Definitions. *Journal of Business Ethics*, 142(3), 437-459. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2741-y>
- Mirvis, P., Herrera, M. E. B., Googins, B., & Albareda, L. (2016). Corporate Social Innovation: How Firms Learn to Innovate for the Greater Good. *Journal of Business Research*, 69(11), 5014-5021. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.073>
- Muchlis, S., & Sukirman, A. S. (2016). Implementasi Maqashid Syariah dalam Corporate Social Responsibility di PT Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 120-130. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7011>
- Mulawarman, A. D., & Kamayanti, A. (2018). Towards Islamic Accounting Anthropology: How Secular Anthropology Reshaped Accounting in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(4), 629-647. <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2015-0004>
- Nazir, O., Islam, J. U., & Rahman, Z. (2021). Effect of CSR Participation on Employee Sense of Purpose and Experienced Meaningfulness: A Self-Determination Theory Perspective. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 46, 123-133. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2020.12.002>
- Orazalin, N., & Baydauletov, M. (2020). Corporate Social Responsibility Strategy and Corporate Environmental and Social Performance: The Moderating Role of Board Gender Diversity. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 27(4), 1664-1676. <https://doi.org/10.1002/csr.1915>
- Phillips, M. (2019). "Daring to care": Challenging Corporate Environmentalism. *Journal of Business Ethics*, 156(4), 1151-1164. <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3589-0>
- Prahara, R., & A'yuni, D. (2021). Corporate Social Responsibility as a Corporate Green Accounting Implementation. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 3(2), 178-185. <https://doi.org/10.31538/ijse.v3i2.1216>
- Purna, I. M., Mintosih, S., & Guritno, S. (1995). *Arti dan Makna Tokoh Pewayangan Mahabarata dalam Pembentukan dan Pembinaan Watak* (Seri I) (Seri I). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Purwati, D., & Tenaya, A. (2018). Implementasi Corporate Social Responsibility Berlandaskan Filosofi Tri Hita Karana pada Lembaga Perkreditan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 23(3), 2203-2229. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v23.i03.p22>
- Rambaud, A., & Richard, J. (2015). The "Triple Depreciation Line" Instead of the "Triple Bottom Line": Towards a Genuine Integrated Reporting. *Critical Perspectives on Accounting*, 33, 92-116. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2015.01.012>
- Ricoeur, P., & Thompson, J. B. (2016). *Hermeneutics and the Human Sciences: Essays on Language, Action and Interpretation*. Cambridge University Press.
- Rismawati. (2015). Memaknai Program Corporate Social Responsibility: Proses Transformasi Sosial Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 245-253. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6020>
- Sahut, J.-M., Peris-Ortiz, M., & Teulon, F. (2019). Corporate Social Responsibility and Governance. *Journal of Management and Governance*, 23, 901-912. <https://doi.org/10.1007/s10997-019-09472-2>
- Santamaria, M. L., Amaya, N., Grueso Hinestroza, M. P., & Cuero, Y. A. (2021). Sustainability Disclosure Practices as Seen Through the Lens of the Signaling Theory: A study of Companies Listed on the Colombian Stock Exchange. *Journal of Cleaner Production*, 317, 128416. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128416>
- Sharon, S. S., & Paranoan, S. (2020). Refleksi Rumah Adat Ammatoa dalam Akuntabilitas Organisasi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 59-76. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.1.04>
- Speziale, M.T. (2019). Theoretical Perspectives on Purposes and Users of Integrated Reporting: A Literature Review. In S. O. Idowu & M. Del Baldo (Eds.), *Integrated Reporting, CSR, Sustainability, Ethics & Governance*, 13-60. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-01719-4>
- Thornton, D. B. (1993). Green Accounting and Green Eyeshades. *CA Magazine*, 24(6), 438-442. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2013.02.004>
- Thornton, D. B. (2013). Green Accounting and Green Eyeshades Twenty Years Later Rejoinder to Critics. *Critical Perspectives on Accounting*, 24(6), 474-476. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2013.05.003>
- Ulupui, I. G. K. A., Murdayanti, Y., Marini, A. C., Purwohedi, U., Mardi, & Yanto, H. (2020). Green Accounting, Material Flow Cost Ac-

- counting and Environmental Performance. *Accounting*, 6(5), 743-752. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.6.009>
- Werasturi, D. N. (2017). Konsep Corporate Social Responsibility berbasis Catur Purusa Artha. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 319-335. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7057>
- Winarno, W. A., & Sawarjuwono, T. (2021). Kritik Atas Triple Bottom Line: Perspektif Memayu Hayuning Bawana. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 113-131. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.1.07>

Jurnal Akuntansi Multiparadigm (JAMAL)






P-ISSN 2086-7603
E-ISSN 2089-5879

Official UB
Gapura
Prasetya

Terindeks:





Anggota dari:


Jurnal Akuntansi Multiparadigma

Terakreditasi SK Kemristek/BRIN No.200/M/KPT/2020

HOME
ABOUT
LOGIN
REGISTER
SEARCH
CURRENT
ARCHIVES
ANNOUNCEMENTS
SITE MAP
CONTACT
ABSTRACTING AND INDEXING

























Home > Archives > Vol 13, No 1 (2022)

Vol 13, No 1 (2022)

Jurnal Akuntansi Multiparadigma (April 2022 - Agustus 2022)

Table of Contents

Articles

	DISKURSUS SAINS KONTEMPORER DAN IMPLIKASINYA PADA AKUNTANSI Fransisco Budi Hardiman, Aji Dedi Mulawarman	 1-15
	MALLEABLE MENTAL ACCOUNTING DAN MAKNA KEBAHAGIAAN SELAMA PANDEMI COVID-19 Handi Brata, Dinda Maulidya Hartiningsih, Nina Febriana Dosinta	 16-31
	IS TAX AVOIDANCE CAUSED BY POLITICAL CONNECTIONS AND EXECUTIVE CHARACTERISTICS? Nur Alfiyah, Bambang Subroto, Abdul Ghofar	 32-41
	REFLEKSI YUDHISTIRA DALAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN AKUNTANSI LINGKUNGAN Irene Natalia	 42-59
	PUBLIC CHATTER AND VILLAGE FUND ACCOUNTING DIALOGUE VIA TWITTER Mohammad Herli, Hamidah Hamidah	 In Press
	APAKAH SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN EFEKTIF MENCEGAH KORUPSI? One Dwi Endarningtyas, Anis Chariri	 In Press
	AKUNTANSI LINGKUNGAN DALAM PENGUNGKAPAN SIMBOLIK DAN SUBSTANTIF Syafira Erriana Pramasita, Zaki Baridwan, Nurofik Nurofik	 In Press
	FONDASI AKUNTABILITAS KEMITRAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: PERSPEKTIF KOSMOLOGI GHAZALI Ade Manggala Hardianto, Basuki Basuki, Bonnie Soeherman	 In Press
	INTERNALISASI ISU PERUBAHAN IKLIM DALAM LAPORAN KEUANGAN Dewa Putra Krishna Mahardika	 In Press
	DOES LOCAL GOVERNMENT BUDGETING ACCOMMODATE GENDER EQUALITY? Paskanova Christi Gainau	 In Press
	APAKAH KEPEMILIKAN ASING BERKONTRIBUSI TERHADAP GREEN ACCOUNTING DAN NILAI PERUSAHAAN? Aldila Putri Soleha, Isnalita Isnalita	 In Press
	APAKAH GOOD CORPORATE GOVERNANCE BERPERAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEBERLANJUTAN? Desak Nyoman Werastuti	 In Press
	STORYTELLING AS AN ALTERNATIVE OF TEACHING (CRITICAL) ACCOUNTING THEORY Ari Kamayanti, Novrida Qudsi Lutfillah	 In Press
	ACCOUNTABILITY FOR GOVERNANCE OF GOVERNMENT FIXED ASSETS Aristanti Widyaningsih	 In Press
	THREE CORPORATE CONTROL STRATEGIES AND FRAUD ACCOUNTING PREVENTION Rudy Budiartmaja, Yanuar Ramadhan	 In Press

About JAMAL

- Aim and Scope
- Editorial Team
- Peer Reviewers
- Management Team
- Publication Ethics
- Copyright Notice
- Visitor Statistic
- History
- Reviewers Acknowledgement

User

Username

Password


☐ Remember me

[Login](#)

Information for Author

- Author Guidelines
- Author Guidelines (PDF Version)
- Submissions Guidelines
- Article Template (Indonesian Version)
- Article Template (English Version)
- Author Fees
- Index of Authors

Language

Select Language English 

[Submit](#)

Tools



- Mendeley User Guide
- Insert Citation using Mendeley



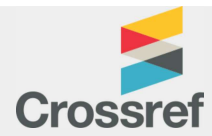
THOMSON REUTERS

ENDNOTE



Index





Accreditation Certificate



Member of



Notifications

- View
- Subscribe

Journal Content

Search

Search Scope All ▼

[Search](#)

Browse

- By Issue
- By Author
- By Title

Information

- For Readers
- For Authors
- For Librarians

Keywords

accountability **akuntabilitas** akuntansi
auditor corporate governance csr dana desa
etika gender kinerja korupsi kualitas audit
manajemen laba nilai perusahaan opini audit
pelaporan pengungkapan profitabilitas tri hita
karana ukuran perusahaan wajib pajak

Current Issue

ATOM 1.0 RSS 2.0 RSS 1.0

JAMAL
Jurnal Akuntansi Multiparadigma
Organized by:
University of Brawijaya and Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia (MAMI)
Powered by [Open Journal System 2.4.7.1](#)



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution 4.0 International License](#)




P-ISSN 2086-7603
E-ISSN 2089-5879

Official UB
Gapura
Prasetya

Terindeks:





Anggota dari:


Jurnal Akuntansi Multiparadigma

Terakreditasi SK Kemristek/BRIN No.200/M/KPT/2020

[HOME](#)
[ABOUT](#)
[LOGIN](#)
[REGISTER](#)
[SEARCH](#)
[CURRENT](#)
[ARCHIVES](#)
[ANNOUNCEMENTS](#)
[SITE MAP](#)
[CONTACT](#)
[ABSTRACTING AND INDEXING](#)

Home > About the Journal > Editorial Team

Editorial Team

Editor in Chief

1. Iwan Triuwono, Universitas Brawijaya, Indonesia

Associate Editor

1. Aji Dedi Mulawarman, Universitas Brawijaya, Indonesia
2. Made Sudarma, Universitas Brawijaya, Indonesia
3. Ali Djamhuri, Universitas Brawijaya, Indonesia
4. Ari Kamayanti, Politeknik Negeri Malang, Indonesia
5. Unti Ludigdo, Universitas Brawijaya, Indonesia
6. Sylvia Veronica Siregar, Universitas Indonesia, Indonesia

International Editorial Board

1. Gugus Irianto, Universitas Brawijaya, Indonesia
2. Mehmet Asutay, Durham University, United Kingdom
3. Sujoko Efferin, Universitas Surabaya, Indonesia
4. Kym Fraser, University of Kurdistan Hewlêr, Iran, Islamic Republic of
5. Tjiptohadi Sawarjuwono, Universitas Airlangga, Indonesia
6. Hadrian Geri Djajadikerta, Edith Cowan University, Australia
7. Abdul Khalid Siti-Nabiha, Universiti Sains Malaysia, Malaysia
8. Terri Trireksani, Murdoch University, Australia
9. Arif Perdana, Singapore Institute of Technology, Singapore
10. Kashan Pirzada, Universiti Utara Malaysia, Malaysia

Managing Editor

1. Jordan Hotman Ekklesia Sitorus, Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia, Indonesia

About JAMAL

- Aim and Scope
- Editorial Team
- Peer Reviewers
- Management Team
- Publication Ethics
- Copyright Notice
- Visitor Statistic
- History
- Reviewers Acknowledgement

User

Username

Password

☐ Remember me

[Login](#)

Information for Author

- Author Guidelines
- Author Guidelines (PDF Version)
- Submissions Guidelines
- Article Template (Indonesian Version)
- Article Template (English Version)
- Author Fees
- Index of Authors

Language

Select Language English ▼

[Submit](#)

Tools



- Mendeley User Guide
- Insert Citation using Mendeley



THOMSON REUTERS

ENDNOTE



Index






P-ISSN 2086-7603
E-ISSN 2089-5879

Official UB
Gapura
Prasetya

Terindeks:







Anggota dari:


[HOME](#)
[ABOUT](#)
[LOGIN](#)
[REGISTER](#)
[SEARCH](#)
[CURRENT](#)
[ARCHIVES](#)
[ANNOUNCEMENTS](#)
[SITE MAP](#)
[CONTACT](#)
[ABSTRACTING AND INDEXING](#)

Home > About the Journal > People

People

Peer Reviewers

Indra Bastian, Universitas Gajah Mada, Indonesia

Krismiaji Krismiaji, Politeknik YKPN, Indonesia

Hanif Hanif, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Astrie Krisnawati, Universitas Telkom, Indonesia

Jamal Roudaki, Lincoln University, New Zealand

Eka Siskawati, Politeknik Negeri Padang

Fivi Anggraini, Universitas Bung Hatta, Indonesia

Sugiyarti Fatma Laela, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tazkia, Indonesia

Fidiana Fidiana, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, Indonesia

Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, Universitas Diponegoro, Indonesia

Salim Darmadi, Otoritas Jasa Keuangan, Indonesia

Harun Harun, University of Canberra, Australia

Sylvia Sylvia, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia, Indonesia

Agus Fredy Maradona, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

Anis Chariri, Universitas Diponegoro, Indonesia

Hidayatul Ihsan, Politeknik Negeri Padang, Indonesia

Fitra Roman Cahaya, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Ani Wilujeng Suryani, Universitas Negeri Malang, Indonesia

Zulkarim Salampessy, Politeknik Negeri Ambon, Indonesia

Novi Puspitasari, Universitas Jember, Indonesia

Nur Indah Riawanti, Politeknik Negeri Malang, Indonesia

Muhammad Nur Abdullah Birton, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Muhammad Akhyar Adnan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Arie Pratama, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Bety Nur Achadiyah, Universitas Negeri Malang, Indonesia

Rangga Handika, Tokyo International University, Japan

Kurnia Ekasari, Politeknik Negeri Malang, Indonesia

Parulian Silaen, University of Wollongong, Australia

Novrida Qudsi Iutfillah, Universitas Wijaya Putra, Indonesia

Masiyah Kholmi, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Yuni Yuningsih, Curtin University, Australia

Nurafni Eltivia, Politeknik Negeri Malang, Indonesia

Dian Purnama Sari, Universitas Katolik Widaya Mandala, Indonesia

Intiyas Utami, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

Ang Swat Lin Lindawati, Universitas Bina Nusantara, Indonesia

About JAMAL

- Aim and Scope
- Editorial Team
- Peer Reviewers
- Management Team
- Publication Ethics
- Copyright Notice
- Visitor Statistic
- History
- Reviewers Acknowledgement

User

Username

Password

☐ Remember me

[Login](#)

Information for Author

- Author Guidelines
- Author Guidelines (PDF Version)
- Submissions Guidelines
- Article Template (Indonesian Version)
- Article Template (English Version)
- Author Fees
- Index of Authors

Language

Select Language English ▼

[Submit](#)

Tools



- Mendeley User Guide
- Insert Citation using Mendeley









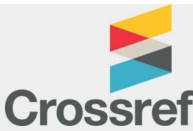
THOMSON REUTERS

ENDNOTE




Index






Accreditation Certificate



Member of



Notifications

- View
- Subscribe

Journal Content

Search

Search Scope All

Search

Browse

- By Issue
- By Author
- By Title

Information

- For Readers
- For Authors
- For Librarians

Keywords

accountability **akuntabilitas** akuntansi
auditor corporate governance csr dana desa
etika gender kinerja korupsi kualitas audit
manajemen laba nilai perusahaan opini audit
pelaporan pengungkapan profitabilitas tri hita
karana ukuran perusahaan wajib pajak

JAMAL
Jurnal Akuntansi Multiparadigma
Organized by:
University of Brawijaya and Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia (MAMI)
Powered by [Open Journal System 2.4.7.1](#)



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution 4.0 International License](#)




P-ISSN 2086-7603
E-ISSN 2089-5879

Official UB Gapura Prasetya







Terakreditasi SK Kemristek/BRIN No.200/M/KPT/2020

Anggota dari:


HOME

ABOUT

LOGIN

REGISTER

SEARCH

CURRENT

ARCHIVES

ANNOUNCEMENTS

SITE MAP

CONTACT

ABSTRACTING AND INDEXING

Home > About the Journal > Submissions

Submissions

- [Online Submissions](#)
- [Author Guidelines](#)
- [Copyright Notice](#)
- [Privacy Statement](#)
- [Author Fees](#)

Online Submissions

Already have a Username/Password for Jurnal Akuntansi Multiparadigma?
[Go to Login](#)

Need a Username/Password?
[Go to Registration](#)

Registration and login are required to submit items online and to check the status of current submissions.

Author Guidelines

THE EDITORIAL GUIDELINES JOURNAL OF MULTIPARADIGM ACCOUNTING (JAMAL) FOR CONCEPTUAL AND EMPIRICAL PAPER

- JAMAL accepts paper/article in the field of multiparadigm accounting as follows:
 1. Positivism.
 2. Interpretivism.
 3. Critical Paradigm.
 4. Postmodernism.
 5. Spiritual/Religious Paradigm.
- Articles submitted can be in the form of:
 1. Empirical research.
 2. Recent accounting thought (conceptual paper).
 3. Book Review (only by invitation).
 4. Obituary (only by invitation).
- Articles must have never been submitted or under a submission process in other journals. Articles can be written in Indonesian or English language.
- Articles is not allowed to be presented on more than one conferences or seminars. Articles which is known to have been presented at more than one aborted conference and the lead author are not allowed to submit articles in this journal.
- Systematics of empirical articles should consists of: Title of Article; Name of Author(s); Address of Author(s); Abstract; Key words; Introduction; Research Methods; Findings and Discussion; Conclusions and Reference.
 1. Title should at the most be 10 words (in English) or 12 words (in Indonesian). The title is written entirely in capital letters and typed center justified and bolded. The name should not bear any title (Dr., Prof., etc). Author name should be written in full and complete mailing address should be provided. In addition, please include e-mail address for the corresponding author.
 2. Abstract should be written in two languages (both in Indonesian and English). Each abstract consists of 75-100 word. Abstracts should contain the title (with bold formatting, purpose, method, and research result).
 3. Key words should consist of 3-5 words.
 4. Introduction consists of 4-5 paragraphs that state research issues, state of the art, and is ended with the purpose of research. State of the art refers to the discussion of the discourse and theoretical studies that reflect the emergence of new issues (novelty) in the research. The proportion of introduction should not be more than 10-15% of the total length of the article. The introduction does not need to be given a title.
 5. Methods delineates the research design of the study, the research target (populations and samples, informants or research subjects), technical development of the instrument or data collection, and data analysis techniques. The research method should be written in narrative style. Hypotheses and research formula should be stated implicitly, instead of clearly stated as hypotheses. The software name does not need to be disclosed. The proportion of research method is 15-20% of the total length of the article.
 6. Findings and discussion provides data analysis with respect to research questions. The use of tables, graphs or diagrams are recommended. Discussion on the table, graph or chart should not merely redescribe content of the table, graph or chart. The discussion should be directed to the explanation and or prediction (positive paradigm), in-depth analysis and interpretation of the meaning of symbols (interpretive), in-depth analysis and critical argumentation proposed (critical paradigm) ,the analysis of the interrelation of objectivity-subjectivity of the new findings that may emerge (postmodern paradigm), and logical analysis, critical ,interrelation of objectivity-subjectivity in the spiritual and religious corridor (spiritual/religious paradigm). The discussion should also include answers to the research questions, explanation of the logic of obtaining the findings, as well as the corresponding analysis of each paradigm. If you require specific sub section, simply write the title of the new subsection in bold formatted as continuous paragraph. Research in positivism should associate findings with theory and or relevant previous research results. Proportion of findings and discussion is 65-80% of the total length of the article.

About JAMAL

- [Aim and Scope](#)
- [Editorial Team](#)
- [Peer Reviewers](#)
- [Management Team](#)
- [Publication Ethics](#)
- [Copyright Notice](#)
- [Visitor Statistic](#)
- [History](#)
- [Reviewers Acknowledgement](#)

User

Username

Password

☐ Remember me

[Login](#)

Information for Author

- [Author Guidelines](#)
- [Author Guidelines \(PDF Version\)](#)
- [Submissions Guidelines](#)
- [Article Template \(Indonesian Version\)](#)
- [Article Template \(English Version\)](#)
- [Author Fees](#)
- [Index of Authors](#)

Language

Select Language English ▼

[Submit](#)

Tools



- [Mendeley User Guide](#)
- [Insert Citation using Mendeley](#)



Index



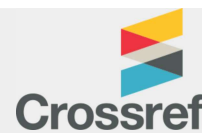
7. Conclusion contains the essence of the findings and discussion. The substance of the conclusions should be relevant to and has been discussed in the findings. Articles written in a non positive paradigm (interpretive, critical, postmodern, spiritual/religious paradigms) can take the different form of writing sections as long as it complies with the rules of scientific writing in each paradigm.
8. Reference should contain all sources cited. The reference should consist at least 80% primary literatures (journal articles) published in recent 10 years. References used should be sources in the form of research articles in journals, proceedings, seminars and research reports (including thesis and dissertation). Articles that have been published in the Journal of Multiparadigm Accounting are recommended for use as references.

- Systematics writing or article for Accounting Thought and Critical/Conceptual Assessment consist of: Title; Name; Mailing Address; Abstract; Introduction; Discussion (may include Sub Discussion); Conclusions, and References.
1. Title should at the most be 10 words (in English) or 12 words (in Indonesian). The title is written entirely in capital letters and typed center justified and bolded. The name should not bear any title (Dr., Prof., etc). Author name should be written in full and complete mailing address should be provided. In addition, please include e-mail address for the corresponding author.
 2. Abstract should be written in two languages (both in Indonesian and English). Each abstract consists of 75-100 word. Abstracts should contain the title (with bold formatting, purpose, method, and research result).
 3. Key words should consist of 3-6 words.
 4. Introduction consists of 4-5 paragraphs that state research issues, state of the art, and is ended with the purpose of research. State of the art refers to the discussion of the discourse and theoretical studies that reflect the emergence of new issues (novelty) in the research. The proportion of introduction should not be more than 10-15% of the total length of the article. Introduction consists of 4-5 paragraphs that state research issues, state of the art, and is ended with the purpose of research. State of the art refers to the discussion of the discourse and theoretical studies that reflect the emergence of new issues (novelty) in the research. The proportion of introduction should not be more than 10-15% of the total length of the article. The introduction does not need to be given a title.
 5. The discussion contains the results of the analysis with respect to logical, critical, and reflective argument on the issue being discussed. Important element of the discussion is the establishment and the author's attitude both objectively and subjectively supported by strong and scientific argument.
 6. Conclusion should contain the essence of the results of the discussion and emphasis on the ideas initiated.
 7. Reference should contain all sources cited. The reference should consist at least 80% primary literatures (journal articles) published in recent 10 years. References used should be sources in the form of research articles in journals, proceedings, seminars and research reports (including thesis and dissertation). Articles that have been published in the Journal of Multiparadigm Accounting are recommended for use as references.

▪ Writing style:

1. Article should be written in proper scientific language.
2. New paragraph begins after the sixth spaces from the left margin. There should be no spaces between paragraphs.
3. All foreign words and special terms should be written in italics. In English-language articles, italics are used only for writing other than English.
4. Taping margins are; left margin: 2 (two) centimeters; top margin: 2 (two) centimeters; right margin: 2 (two) centimeters; and bottom margin: 2 (two) centimeters.
5. It is not allowed to give attachment. All tables, pictures, or transcripts are included in the body of articles.
6. Citation style within the body text and in references are as follows American Psychological Association (APA) Style 7th Edition.

References	In Body Text	In Reference
Article	Parenthetical citation: (Rudyanto, 2019)	Rudyanto, A. (2019). Mimetic Isomorphism as a Reason for Preparing Sustainability Report. <i>Jurnal Akuntansi Multiparadigma</i> , 10(3), 433-447. https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2019.10.3.25
1 Author	Narrative citation: Rudyanto (2019)	
Article	Parenthetical citation: (Soediro & Meutia, 2018)	Soediro, A., & Meutia, I. (2018). Maqasid Sharia as a Performance Framework for Islamic Financial Institutions. <i>Jurnal Akuntansi Multiparadigma</i> , 9(1), 70-86. https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9005
2 Authors	Narrative citation: Soediro & Meutia (2018)	
Article	Parenthetical citation: (Yefni et al, 2018)	Yefni, Y., Murniati, S., Zifi, M., & Yuliantoro, H. (2018). What are the Motivation of Taxpayers in Using E-Filing Information System? <i>Jurnal Akuntansi Multiparadigma</i> , 9(3), 510-525. https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9030
More than 2 Authors	Narrative citation: Yefni et al. (2018)	
Article	Parenthetical citation: (Hamidah, 2017)	Hamidah. (2017). IFRS Adoption in Indonesia: Accounting Ecology Perspective. <i>International Journal of Economics and Management</i> , 1(S1), 121-132.
Without DOI	Narrative citation: Hamidah (2017)	
More than 1 Articles (Ordered by Alphabet)	Parenthetical citation: (Brown & Dillard, 2015; Manochin & Cooper, 2015; Mulawarman & Kamayanti, 2018). Narrative citation: Brown & Dillard (2015), Manochin & Cooper (2015), and Mulawarman & Kamayanti (2018)	
Book	Parenthetical citation: (Baydoun et al., 2018)	Baydoun, N., Sulaiman, M., Willett, R. J., Ibrahim, S. H. B. M. (2018). <i>Principles of Islamic Accounting</i> . John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd. https://doi.org/10.1002/9781119444480
Using DOI	Narrative citation: Baydoun et al. (2018)	
Book	Parenthetical citation: (Gleeson-White, 2015)	Gleeson-White, J. (2015). <i>Six Capitals, Or Can Accountants Save the Planet?: Rethinking Capitalism for the Twenty-first Century</i> . W.W. Norton.
Without DOI	Narrative citation: Gleeson-White (2015)	



Accreditation Certificate



Member of



Notifications

- View
- Subscribe

Journal Content

Search

Search Scope All ▼

Search

Browse

- By Issue
- By Author
- By Title

Information

- For Readers
- For Authors
- For Librarians

Keywords

accountability **akuntabilitas** akuntansi
auditor corporate governance csr dana desa
etika gender kinerja korupsi kualitas audit
manajemen laba nilai perusahaan opini audit
pelaporan pengungkapan profitabilitas tri hita
karana ukuran perusahaan wajib pajak

Book Chapter	Parenthetical citation: (Subramaniam & Watson, 2016) Narrative citation: Subramaniam & Watson (2016)	Subramaniam, C., & Watson, M. W. (2016). Additional Evidence on the Sticky Behavior of Costs. In M. A. Malina (Ed.), <i>Advances in Management Accounting</i> (26 ed., pp. 275–305). Emerald Group Publishing.
Conference Paper Presentation	Parenthetical citation: (Kamayanti, 2019) Narrative citation: Kamayanti (2019)	Kamayanti, A. (2019, August 29-30). <i>Vocational Accounting Education: Are We Producing Labours or Architects of Civilization?</i> (Paper Presentation). 1st Annual Management, Business and Economic Conference, Malang, Indonesia.
Conference Poster Presentation	Parenthetical citation: (Hendricks, 2018) Narrative citation: Hendricks (2018)	Hendricks, B. (2018, November 15-16). <i>The Revolving Door between the PCAOB and Large Audit Firms</i> (Poster Presentation). 31st Annual Accounting Research Conference in Memory of Nicholas Dopuch, Hubert C., & Dorothy R. Moog, Professor of Accounting, Missouri, United States.
Thesis/Disertation	Parenthetical citation: (Mazzola, 2018) Narrative citation: Mazzola (2018)	Mazzola, P. (2018). <i>Power and Influence in the US Investment Banking Industry – a Case Study of Lehman Brothers</i> (Unpublished Doctoral Dissertation). University of Wollongong.
Annual Report	Parenthetical citation: (PT Unilever Indonesia, 2019) Narrative citation: PT Unilever Indonesia (2019)	PT Unilever Indonesia. (2019). <i>2019th Annual Report</i> . https://www.unilever.co.id/id/Images/laporan-tahunan-2019_tcm1310-552837_1_id.pdf
Internet Source	Parenthetical citation: (Zamami & Wahyuni, 2017) Narrative Citation: Zamami & Wahyuni (2017)	Zamami, A., & Wahyuni, E. T. W. (2017, September 21). Improving Audit Quality in Indonesia: Lesson Learned from PCAOB Inspections. <i>Etw Accountant</i> . http://etw-accountant.com/improving-audit-quality-in-indonesia-lesson-learned-from-pcaob-inspections/

- There is no vertical line for the table. The table source is placed under left alignment. The table display is as follows:

Table 1. Details of the Budget Distribution

Types of Budget	Total of Budget Realization
Aaaaa	Rpxxx.xxx.xxx,00
Bbbbb	Rpxxx.xxx.xxx,00
Cccccc	Rpxxx.xxx.xxx,00

Source: Described

- The figure title and source are placed on the center bottom of the figure. The figure is unframed. The figure display is as follows:

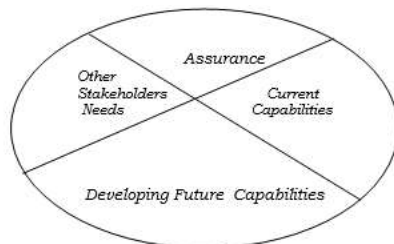


Figure 1. Elements of Evaluating the Effectiveness of Internal Audit Functions

Source: Cain (2007)

- Every submitted article will be blind-reviewed by minimum two reviewers.
- When required, the editor will change and, or fix spelling, and correct the grammar of the article without changing its substantial meaning.
- Manuscripts should be submitted directly JAMAL OJS in www.jamal.ub.ac.id.
- Article should be written in MS Word, single spaced, font size 10, Bookman Old Style. Minimum pages for qualitative and mixed method articles is 15 pages and 10 pages for quantitative articles (FULL PAGE).
- The author(s) should use reference application (Mendeley).
- After the article meets the structure standards, the management team will conduct a plagiarism test using a reference application (turnitin / plagscan). The author(s) is prohibited from conducting plagiarism testing without the knowledge of the management team. The maximum plagiarism limit is 5%. The author will be asked to revise the article if the article does not meet the maximum plagiarism limit.
- Complement to the sponsors and peer discussions (if any) should be placed as explanatory footnotes of the title of the article .
- All articles as results of studies in particular research site/institution/informant should include a Statement of Ethical Clearance that has been confirmed by the institution/research informants.
- Journal of Multiparadigm Accounting publish its journal 3 times in a year, on April-August, August-December, and December-April. Article must be sent at least one month before the month of publication (March, July dan November).
- Please check article samples for editorial style example by registering at www.jamal.ub.ac.id.
- Everyone who wants to buy a print edition can reimburse a print fee of Rp200,000.00 (please contact the official email for further details).

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

- The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
- The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
- Where available, URLs for the references have been provided.
- The text is single-spaced; uses a 10-point font (Bookman Old Style); employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.

5. The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the [Author Guidelines](#), which is found in [About the Journal](#).
6. If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in [Ensuring a Blind Review](#) have been followed.

Copyright Notice

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution License](#) (CC BY-NC) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
3. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See [The Effect of Open Access](#)).

Under the following terms of [Creative Commons](#) (CC BY-NC):

- Attribution — You must give [appropriate credit](#), provide a link to the license, and [indicate if changes were made](#). You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
- NonCommercial — You may not use the material for [commercial purposes](#).
- No additional restrictions — You may not apply legal terms or [technological measures](#) that legally restrict others from doing anything the license permits.

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.

Author Fees

This journal charges the following author fees.

Article Submission: 0.00 (IDR)

Authors are not required to pay an Article Submission Fee as part of the submission process to contribute to review costs.

Article Publication: 2500000.00 (IDR)

If this paper is accepted for publication, you will be asked to pay an Article Publication Fee to cover publications costs.

The publication fee can be transferred to our official bank account:

Acc. Name: Iwan Triyuwono

Acc. Number: 7103918582 (Bank Syariah Mandiri - Indonesia)

If you do not have funds to pay such fees, you will have an opportunity to waive each fee. We do not want fees to prevent the publication of worthy work.

JAMAL

Jurnal Akuntansi Multiparadigma

Organized by:

University of Brawijaya and Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia (MAMI)

Powered by [Open Journal System 2.4.7.1](#)



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution 4.0 International License](#)





JURNAL AKUNTANSI MULTIPARADIGMA

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

P-ISSN : 20867603 < > E-ISSN : 20895879 Subject Area : Economy



2

Impact Factor



6116

Google Citations



Sinta 2

Current Accreditation

[Google Scholar](#)
[Garuda](#)
[Website](#)
[Editor URL](#)

History Accreditation

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

[Garuda](#)
[Google Scholar](#)

FONDASI AKUNTABILITAS KEMITRAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: PERSPEKTIF KOSMOLOGI GHAZALI

Universitas Brawijaya [Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol 13, No 1 \(2022\): Jurnal Akuntansi Multiparadigma \(April 2022 - Agustus 2022\) In Press](#)2022 [DOI: 10.21776/ub.jamal.2021.13.1.08](#) [Accred : Sinta 2](#)

REFLEKSI YUDHISTIRA DALAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN AKUNTANSI LINGKUNGAN

Universitas Brawijaya [Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol 13, No 1 \(2022\): Jurnal Akuntansi Multiparadigma \(April 2022 - Agustus 2022\) In Press](#)2022 [DOI: 10.21776/ub.jamal.2021.13.1.04](#) [Accred : Sinta 2](#)

PUBLIC CHATTER AND VILLAGE FUND ACCOUNTING DIALOGUE VIA TWITTER

Universitas Brawijaya [Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol 13, No 1 \(2022\): Jurnal Akuntansi Multiparadigma \(April 2022 - Agustus 2022\) In Press](#)2022 [DOI: 10.21776/ub.jamal.2021.13.1.05](#) [Accred : Sinta 2](#)

ACCOUNTABILITY FOR GOVERNANCE OF GOVERNMENT FIXED ASSETS

Universitas Brawijaya [Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol 13, No 1 \(2022\): Jurnal Akuntansi Multiparadigma \(April 2022 - Agustus 2022\) In Press](#)2022 [DOI: 10.21776/ub.jamal.2021.13.1.14](#) [Accred : Sinta 2](#)

APAKAH KEPEMILIKAN ASING BERKONTRIBUSI TERHADAP GREEN ACCOUNTING DAN NILAI PERUSAHAAN?

Universitas Brawijaya [Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol 13, No 1 \(2022\): Jurnal Akuntansi Multiparadigma \(April 2022 - Agustus 2022\) In Press](#)2022 [DOI: 10.21776/ub.jamal.2021.13.1.11](#) [Accred : Sinta 2](#)

STORYTELLING AS AN ALTERNATIVE OF TEACHING (CRITICAL) ACCOUNTING THEORY

Universitas Brawijaya [Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol 13, No 1 \(2022\): Jurnal Akuntansi Multiparadigma \(April 2022 - Agustus 2022\) In Press](#)2022 [DOI: 10.21776/ub.jamal.2021.13.1.13](#) [Accred : Sinta 2](#)

MALLEABLE MENTAL ACCOUNTING DAN MAKNA KEBAHAGIAAN SELAMA PANDEMI COVID-19

Universitas Brawijaya [Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol 13, No 1 \(2022\): Jurnal Akuntansi Multiparadigma \(April 2022 - Agustus 2022\) In Press](#)2022 [DOI: 10.21776/ub.jamal.2021.13.1.02](#) [Accred : Sinta 2](#)

APAKAH GOOD CORPORATE GOVERNANCE BERPERAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEBERLANJUTAN?

Universitas Brawijaya [Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol 13, No 1 \(2022\): Jurnal Akuntansi Multiparadigma \(April 2022 - Agustus 2022\) In Press](#)2022 [DOI: 10.21776/ub.jamal.2021.13.1.12](#) [Accred : Sinta 2](#)

APAKAH SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN EFEKTIF MENCEGAH KORUPSI?

Universitas Brawijaya [Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol 13, No 1 \(2022\): Jurnal Akuntansi Multiparadigma \(April 2022 - Agustus 2022\) In Press](#)2022 [DOI: 10.21776/ub.jamal.2021.13.1.06](#) [Accred : Sinta 2](#)

PARADIGMA NUSANTARA VERSUS DISKURSUS SAINS PLURALISME DAN HOLISME UNTUK AKUNTANSI

Universitas Brawijaya [Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol 13, No 1 \(2022\): Jurnal Akuntansi Multiparadigma \(April 2022 - Agustus 2022\) In Press](#)2022 [DOI: 10.21776/ub.jamal.2021.13.1.01](#) [Accred : Sinta 2](#)
[View more ...](#)